



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

# APBN KITA

KINERJA DAN FAKTA

**Kinerja APBN Adaptif di Tengah  
Risiko Global yang Semakin  
Dinamis**

APRIL | 2024

Foto:  
Kemenkeu Foto - DJBC

Scan dan Unduh  
APBN KITA



ISSN link  
APBN KiTa



Terima kasih pembaca. Sampaikan kritik dan saran Anda untuk meningkatkan kualitas publikasi APBN KiTa dengan scan barcode di bawah ini:

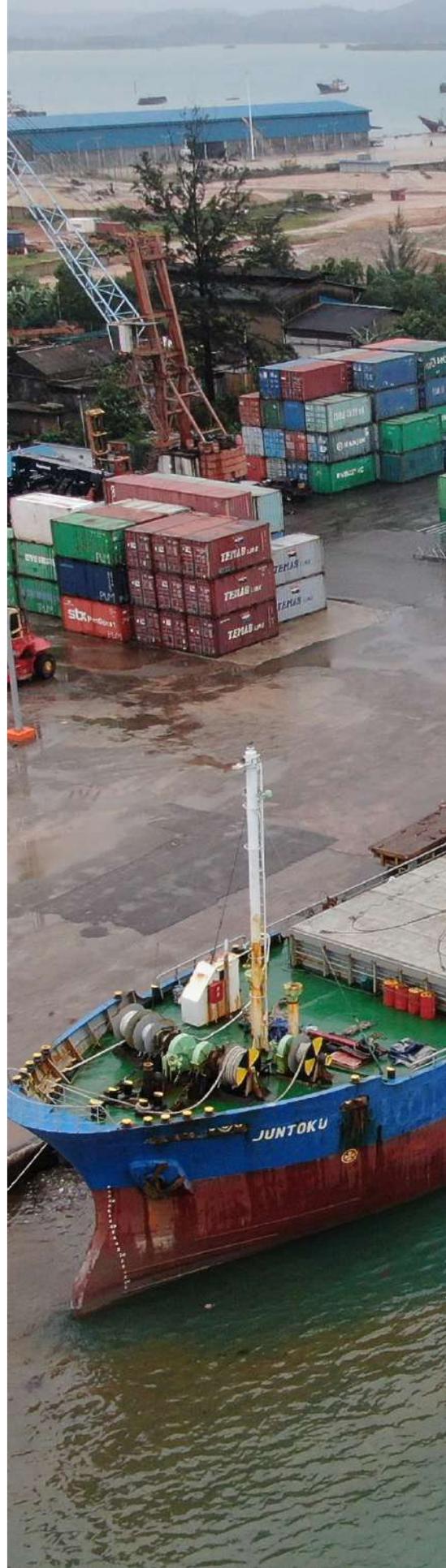


A portrait of Sri Mulyani Indrawati, a woman with short dark hair and round glasses, smiling. She is wearing a traditional Indonesian batik blouse with intricate blue and white patterns. Her hands are clasped in front of her.

**“Kinerja APBN hingga Maret masih *on track* namun perlu merespon dan mewaspadaai kemungkinan adanya *adjustment* dengan kondisi perekonomian global.”**

**Sri Mulyani Indrawati**

**Diterbitkan oleh:** Kementerian Keuangan Republik Indonesia. **Pelindung:** Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan. **Pengarah:** Pimpinan Unit Eselon I Kemenkeu **Penanggung Jawab:** Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko selaku Sekretaris Komite Asset-Liability Committee Kementerian Keuangan. **Pemimpin Redaksi:** Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro. **Dewan Redaksi:** Tim Deputies Asset-Liability Committee Kementerian Keuangan. **Tim Redaksi:** Tim Teknis Asset-Liability Committee Kementerian Keuangan, Tim Redaksi Penyusun Publikasi APBN KiTa. **Editor:** Tim Editor Penyusun Publikasi APBN KiTa **Desain Grafis, Layout dan Foto:** Biro KLI Kementerian Keuangan. Alamat Redaksi: Gedung Frans Seda Lantai 8, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta.

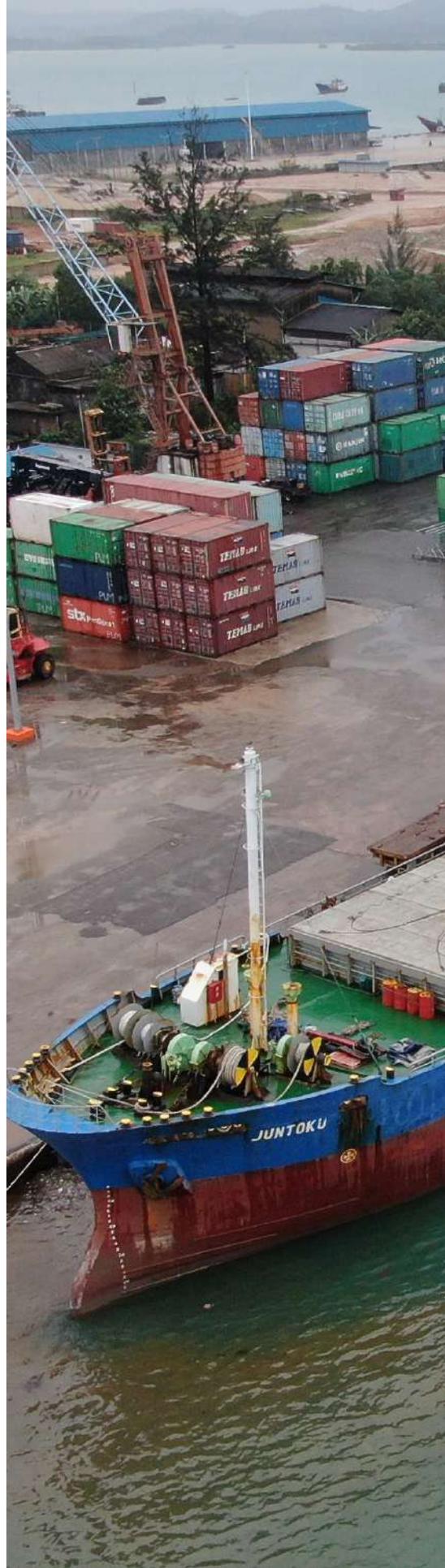


# Daftar Isi

<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b>	<b>9</b>
<b>PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO</b>	<b>17</b>
<b>POSTUR APBN</b>	<b>21</b>
Penerimaan Perpajakan	25
Penerimaan Kepabeanan & Cukai	31
Penerimaan Negara Bukan Pajak	37
Belanja Pemerintah Pusat	43
Transfer ke Daerah	49
Pembiayaan Utang	55
<i>Calendar Events 2024</i>	60
Laporan Khusus	62

# Glossarium

- Alutsista** : Alat Utama Sistem Persenjataan
- Almatsus** : Alat Material Khusus
- AP** : *Adminitered Price*
- APBN** : Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara
- AS** : Amerika Serikat
- ASEAN** : *The Association of Southeast Asian Nations*
- ASN** : Aparatur Sipil Negara
- Bansos** : Bantuan Sosial
- Bapanas** : Badan Pangan Nasional
- BBM** : Bahan Bakar Minyak
- BI** : Bank Indonesia
- BK** : Bea Keluar
- BLT** : Bantuan Langsung Tunai
- BLU** : Badan Layanan Umum
- BM** : Bea Masuk
- BMN** : Barang Milik Negara
- BPJS** : Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial
- BPS** : Badan Pusat Statistik
- bps** : basis points
- BUK** : Bank Umum Konvensional
- BUS** : Bank Umum Syariah
- BUMN** : Badan Usaha Milik Negara
- CAR** : *Capital Adequacy Ratio*
- CDS** : *Credit Default Swap*
- CHT** : Cukai Hasil Tembakau





<b>IPM</b>	: Indeks Pembangunan Manusia
<b>IPO</b>	: <i>Initial Public Offering</i>
<b>JKN</b>	: Jaminan Kesehatan Nasional
<b>K/L</b>	: Kementerian/Lembaga
<b>KI</b>	: Kredit Investasi
<b>KIP</b>	: Kartu Indonesia Pintar
<b>KI</b>	: Kredit Konsumsi
<b>KKB</b>	: Kredit Kendaraan Bermotor
<b>KLCI</b>	: Kuala Lumpur Composite Indeks
<b>KMK</b>	: Kredit Modal Kerja
<b>KND</b>	: Kekayaan Negara Dipisahkan
<b>KPM</b>	: Keluarga Penerima Manfaat
<b>KPR</b>	: Kredit Pemilikan Rumah
<b>KUR</b>	: Kredit Usaha Rakyat
<b>LMAN</b>	: Lembaga Manajemen Aset Negara
<b>LNPR</b>	: Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga
<b>LPG</b>	: <i>Liquefied Petroleum Gas</i>
<b>MBR</b>	: Masyarakat Berpenghasilan Rendah
<b>Migas</b>	: Minyak dan Gas Bumi
<b>mtm</b>	: <i>Month to Month</i>
<b>MTN</b>	: <i>Medium Term Note</i>
<b>NDA</b>	: <i>Net Domestic Asset</i>
<b>NFA</b>	: <i>Net Foreign Asset</i>
<b>NFB</b>	: <i>Net Foreign Buy</i>
<b>NIM</b>	: <i>Net Interest Margin</i>
<b>NPI</b>	: Neraca Pembayaran Indonesia
<b>NPL</b>	: <i>Non-performing Loan</i>



Penerimaan Pajak	393,91
Penerimaan Bea & Cukai	69,00
Penerimaan Negara Bukan Pajak	156,70
Penerimaan Hibah	0,41
Belanja Kementerian/Lembaga	222,25
Belanja Non Kementerian/Lembaga	205,37
Transfer ke Daerah	184,32

Dalam Triliun Rupiah

Foto: Pexels - Sora Shimazaki

# Ringkasan Eksekutif

**H**ingga berakhirnya Triwulan I 2024 pada 31 Maret 2024, realisasi Pendapatan Negara dan Hibah tercatat Rp620,01 triliun atau telah mencapai 22,15 persen dari target APBN 2024<sup>1</sup>. Capaian tersebut lebih rendah Rp26,68 triliun dari periode yang sama tahun lalu. Dari sisi pertumbuhannya, realisasi Pendapatan Negara dan Hibah berkontraksi 4,13 persen (yoy), kontraksi tersebut lebih rendah dibandingkan periode bulan sebelumnya. Secara nominal, realisasi komponen Pendapatan Negara yang bersumber dari penerimaan Perpajakan mencapai Rp462,91 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp156,70 triliun, dan realisasi Hibah mencapai Rp0,41 triliun. Berdasarkan pertumbuhannya, realisasi penerimaan



**Kinerja perpajakan pada Triwulan I 2024 ini masih dipengaruhi oleh faktor volatilitas harga komoditas dengan kecenderungan menurun.**

Perpajakan terkontraksi 8,18 persen (yoy), sedangkan PNBP tumbuh 9,98 persen (yoy). Capaian masing-masing komponen Pendapatan Negara tersebut terhadap target berturut-turut Perpajakan 20,04 persen dan PNBP 31,85 persen.

**Realisasi penerimaan Perpajakan bersumber dari penerimaan Pajak serta Kepabeanaan dan Cukai. Hingga akhir Triwulan I 2024 capaian penerimaan Pajak tercatat Rp393,91 triliun dan Kepabeanaan dan Cukai Rp69,00 triliun.**

Kinerja penerimaan Perpajakan tersebut terkontraksi, hal tersebut juga terlihat pada kinerja pertumbuhan komponen penerimaan Pajak yang mengalami kontraksi 8,80 persen (yoy) serta Kepabeanaan dan Cukai juga terkontraksi 4,50 persen (yoy). Sementara itu, realisasi penerimaan Pajak serta Kepabeanaan dan Cukai tersebut masing-masing telah mencapai 19,81 persen dan 21,50 persen terhadap target. Kinerja perpajakan pada Triwulan I 2024 ini masih dipengaruhi oleh faktor volatilitas harga komoditas dengan kecenderungan menurun, dampak peningkatan restitusi dan penurunan pembayaran Pajak Penghasilan (PPH) badan pada sektor batubara.

**Penerimaan Pajak terutama berasal dari penerimaan PPh Nonmigas Rp220,42 triliun dan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN/PPnBM) Rp155,79 triliun.**

Kontribusi kedua komponen penerimaan Pajak tersebut terhadap total penerimaan Pajak masing-masing 55,96 persen dan 39,55 persen. Secara lebih detail, PPh Nonmigas masih ditopang oleh tiga komponen terbesarnya yang bersumber dari PPh Pasal 21, PPh Pasal 25/29 Badan, dan PPh Final, dimana kontribusi ketiganya mencapai 69,41 persen terhadap total penerimaan

PPh Nonmigas. Berdasarkan pertumbuhannya, PPh Nonmigas pada Triwulan I 2024 terkontraksi 2,16 persen (yoy). Hal tersebut didukung oleh pertumbuhan dua komponen utamanya, yaitu PPh Pasal 21 dan PPh Final yang berturut-turut tumbuh 25,88 persen (yoy) dan 13,09 persen (yoy). Namun, pertumbuhan PPh Badan tercatat terkontraksi cukup dalam 29,79 persen (yoy), sehingga secara net kinerja PPh Nonmigas terkontraksi. Pertumbuhan komponen penerimaan PPh Pasal 21 dipengaruhi oleh masih terjaganya utilisasi tenaga kerja akibat perbaikan gaji dan upah, sedangkan PPh Badan disebabkan oleh peningkatan faktor restitusi dan turunnya setoran dari Wajib Pajak (WP) sektor pertambangan batubara. Namun, secara penerimaan pajak bruto realisasinya masih tumbuh. Selain itu, kinerja PPh Nonmigas juga didorong oleh pertumbuhan kinerja komponen PPh yang lain seperti PPh Orang Pribadi (OP), PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 22. Selanjutnya, realisasi penerimaan Pajak dari komponen penerimaan PPN/PPnBM secara nominal terutama ditopang oleh penerimaan PPN, khususnya PPN Dalam Negeri (PPN DN) dan PPN Impor dengan kontribusi dari kedua komponen tersebut masing-masing 55,87 persen dan 39,40 persen terhadap total penerimaan PPN/PPnBM. Secara kumulatif PPN/PPnBM terkontraksi 16,25 persen (yoy). Secara lebih detail, hingga 31 Maret 2024 PPN DN terkontraksi 23,82 persen (yoy) dan PPN Impor terkontraksi 2,80 persen (yoy). Kinerja PPN DN terutama dipengaruhi oleh peningkatan restitusi yang terjadi secara signifikan terutama dari sektor industri pengolahan, perdagangan dan pertambangan. Sedangkan kinerja PPN Impor dipengaruhi oleh penurunan impor komoditas utama seperti gas alam dan suku cadang kendaraan bermotor.



## **Indonesia Crude Price (ICP) dan *lifting* migas berkurang karena penurunan tingkat alamiah sumur migas sejalan dengan fasilitas produksi migas utama yang telah menua.**

Capaian realisasi penerimaan Kepabeanaan dan Cukai terdiri atas penerimaan Cukai Rp53,00 triliun, Bea Masuk (BM) Rp11,85 triliun, dan Bea Keluar (BK) Rp4,16 triliun. Penerimaan Kepabeanaan dan Cukai terutama didukung oleh penerimaan dari Cukai, khususnya Cukai Hasil Tembakau (CHT) dengan kontribusi mencapai 76,81 persen terhadap total penerimaan Kepabeanaan dan Cukai. Hingga Triwulan I 2024, kinerja komponen penerimaan Kepabeanaan dan Cukai terkontraksi pada penerimaan Cukai dan BM. Hanya penerimaan BK yang kinerjanya tercatat tumbuh positif. Kinerja Cukai terkontraksi 6,86 persen (yoy) dan BM terkontraksi 3,82 persen (yoy), sedangkan untuk kinerja BK tumbuh cukup signifikan 37,01 persen (yoy). Kinerja penerimaan Cukai menurun terutama akibat penurunan produksi serta pelunasan maju dari Januari 2024 ke Desember 2023. Sementara itu, kinerja BM dipengaruhi oleh penurunan penerimaan dari komoditas utama akibat tarif efektif BM yang menurun. Di sisi lain, kinerja BK

meningkat terutama dipengaruhi oleh relaksasi ekspor komoditas tembaga, meskipun BK produk sawit menurun akibat penurunan harga dan volume.

### **Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)**

Realisasi PNBP sampai dengan akhir Maret 2024 mencapai Rp156,69 triliun (31,85 persen terhadap target) atau tumbuh 9,98 persen (yoy). Kinerja PNBP meningkat didominasi oleh PNBP Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) yang signifikan, sedangkan PNBP Sumber Daya Alam (SDA), Badan Layanan Umum (BLU), dan Lainnya melambat.

Secara lebih rinci, realisasi Pendapatan SDA mencapai Rp53,49 triliun atau terkontraksi 28,93 persen (yoy). Hal ini terjadi pada SDA Migas maupun Nonmigas. Perlambatan kinerja SDA Migas 17,99 persen (yoy) dipengaruhi oleh dampak penurunan pasokan minyak akibat konflik Timur Tengah. Indonesia Crude Price (ICP) dan *lifting* migas berkurang karena penurunan tingkat alamiah sumur migas sejalan dengan fasilitas produksi migas utama yang telah menua. Sedangkan, perlambatan pertumbuhan SDA Nonmigas 36,71 persen (yoy) terutama dipengaruhi oleh kinerja penerimaan royalti karena tren Harga Batubara Acuan (HBA) yang termoderasi serta penurunan volume produksi.

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari KND mengalami pertumbuhan Rp42,89 triliun (50 persen dari target) atau tumbuh signifikan 833,47 persen (yoy). Peningkatan signifikan PNBP KND terutama disebabkan oleh adanya pembayaran setoran dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor perbankan.

**Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari BLU berkontraksi dengan capaian realisasi Rp17,86 triliun, lebih rendah 1,90 persen (yoy).**

Penurunan PNBP BLU disebabkan oleh kontraksi pendapatan dana BLU Sawit 47,36 persen (yoy) akibat penurunan harga referensi *Crude Palm Oil* (CPO) Kementerian Perdagangan (Kemendag) pada Maret 2024. Sedangkan pendapatan BLU Nonsawit tumbuh akibat kenaikan Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit 42,81 persen (yoy) dan kenaikan Jasa Pelayanan Pendidikan 13,40 persen (yoy).

**Sedangkan Dari PNBP Lainnya, hingga akhir Maret 2024 terealisasi Rp42,43 triliun atau turun 4,40 persen (yoy).** Penurunan realisasi terutama disebabkan oleh penurunan PNBP PHT (penjualan hasil tambang) 39,95 persen (yoy) karena moderasi HBA 74,7 persen (yoy). Sedangkan pendapatan PNBP Kementerian/Lembaga (K/L) meningkat 12,12 persen (yoy) terutama disebabkan oleh peningkatan PNBP Nonlayanan dari denda dana kompensasi batubara dan pengembalian atas



**Realisasi Subsidi BBM dan Subsidi LPG Tabung 3 Kg naik 13,81 persen (yoy) dengan realisasi Subsidi BBM Rp3,30 triliun.**

belanja tahun anggaran yang lalu (TAYL) Kementerian Sosial 99,8 persen (yoy).

### **Belanja Negara**

**Realisasi Belanja Negara sampai dengan akhir Maret 2024 mencapai Rp611,94 triliun (18,40 persen dari pagu).** Realisasi Belanja Negara tersebut meliputi realisasi Belanja Pemerintah Pusat Rp427,62 triliun dan Transfer ke Daerah Rp184,32 triliun. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat sampai dengan 31 Maret 2024 tumbuh 23,14 persen (yoy). Peningkatan realisasi Belanja Pemerintah Pusat terutama dipengaruhi oleh pertumbuhan Belanja Pegawai terutama untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) ASN/TNI/POLRI baik pegawai aktif maupun pensiunan. Selain itu, realisasi Belanja Barang hingga akhir Maret 2024 dimanfaatkan terutama untuk mendukung persiapan, pelaksanaan dan pengawasan Pemilu 2024.

### **Subsidi**

**Realisasi Belanja Subsidi sampai dengan akhir Maret 2024 mencapai Rp30,11 triliun (10,53 persen dari pagu) atau turun 19,79 persen (yoy).** Realisasi Belanja Subsidi tersebut meliputi Subsidi Energi Rp27,86 triliun, naik 13,75 persen (yoy) dan Subsidi Nonenergi Rp2,25 triliun, turun 82,76 persen (yoy).

**Realisasi Belanja Subsidi Energi terutama bersumber dari Subsidi BBM dan Subsidi LPG Tabung 3 Kg yang mencapai Rp16,48 triliun (14,55 persen dari pagu).** Realisasi Subsidi BBM dan Subsidi LPG Tabung 3 Kg naik 13,81 persen (yoy) dengan realisasi Subsidi BBM Rp3,30 triliun yang terdiri atas Subsidi Minyak Tanah, Solar dan yang terbesar Subsidi LPG Tabung 3 Kg dengan realisasi mencapai Rp13,18 triliun. Pertumbuhan Subsidi BBM dan Subsidi LPG Tabung 3 Kg sampai

dengan akhir Maret 2024 terutama dipengaruhi oleh kenaikan rata-rata ICP 3,61 persen (yoy) atau USD2,80 per barel, sementara volume untuk LPG Tabung 3 Kg naik 0,02 juta metrik ton atau 1,01 persen (yoy), namun sebaliknya untuk volume konsumsi BBM justru menurun 0,11 juta kilo liter atau turun 2,51 persen (yoy). **Selain itu, dalam Subsidi Energi terdapat juga Subsidi Listrik dengan realisasi sampai dengan akhir Maret 2024 Rp11,38 triliun atau naik 13,69 persen (yoy). Dari segi volume, realisasi konsumsi listrik yang terjadi yakni 11,20 TWh, naik 1,00 TWh atau tumbuh 9,80 persen (yoy).** Kenaikan realisasi Subsidi Listrik ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan rata-rata ICP serta volume konsumsi listrik.

Selanjutnya, realisasi Belanja Subsidi Nonenergi tercatat Rp2,25 triliun, atau turun 82,76 persen (yoy). Realisasi tersebut masih didominasi oleh Subsidi Kredit Program Rp2,11 triliun atau 93,78 persen dari total realisasi Subsidi Nonenergi. Sementara, realisasi lain dari Subsidi Nonenergi adalah Subsidi *Public Services Obligation* (PSO) yang sampai dengan Maret 2024 telah mencapai Rp132,4 miliar atau turun 29,46 persen (yoy). Penyaluran tahun berjalan jenis Subsidi Nonenergi lainnya belum terdapat realisasi, dikarenakan masih adanya proses penyelesaian administrasi dan verifikasi.

### Transfer ke Daerah

**Realisasi Transfer ke Daerah (TKD) sampai dengan 31 Maret 2024 mencapai Rp184,32 triliun atau 21,49 persen dari pagu.** Dilihat dari pertumbuhannya, realisasi TKD lebih tinggi Rp12,98 triliun, naik 7,58 persen (yoy). Secara umum, peningkatan realisasi TKD terutama disebabkan oleh realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Rp111,60 triliun, lebih tinggi Rp7,39



**Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik menjadi satu-satunya jenis transfer yang mencatatkan penurunan. DAK Nonfisik terealisasi Rp31,27 triliun, lebih rendah Rp0,05 triliun atau turun 0,16 persen (yoy).**

triliun atau naik 7,09 persen (yoy). Hal itu terjadi seiring dengan peningkatan kepatuhan pemda dalam memenuhi syarat salur. Realisasi jenis TKD lain yang meningkat yaitu: 1) Dana Bagi Hasil (DBH) Rp24,12 triliun, lebih tinggi Rp1,87 triliun atau 8,39 persen (yoy); 2) Dana Keistimewaan DIY Rp0,21 triliun, atau lebih tinggi Rp0,05 triliun atau 28,55 persen (yoy); dan 3) Dana Desa Rp16,85 triliun, lebih tinggi Rp3,82 triliun, atau 29,33 persen (yoy); serta 4) Insentif fiskal Rp0,26 triliun, lebih tinggi Rp0,11 triliun atau 69,25 persen (yoy).

Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik menjadi satu-satunya jenis transfer yang mencatatkan penurunan. DAK Nonfisik terealisasi Rp31,27 triliun, lebih rendah Rp0,05 triliun atau turun 0,16 persen (yoy). Sementara itu, DAK Fisik, Hibah ke Daerah, dan Dana Otonomi Khusus

belum mencatatkan realisasi karena pemerintah daerah masih berproses dalam memenuhi syarat penyaluran.

### **Pembiayaan Utang**

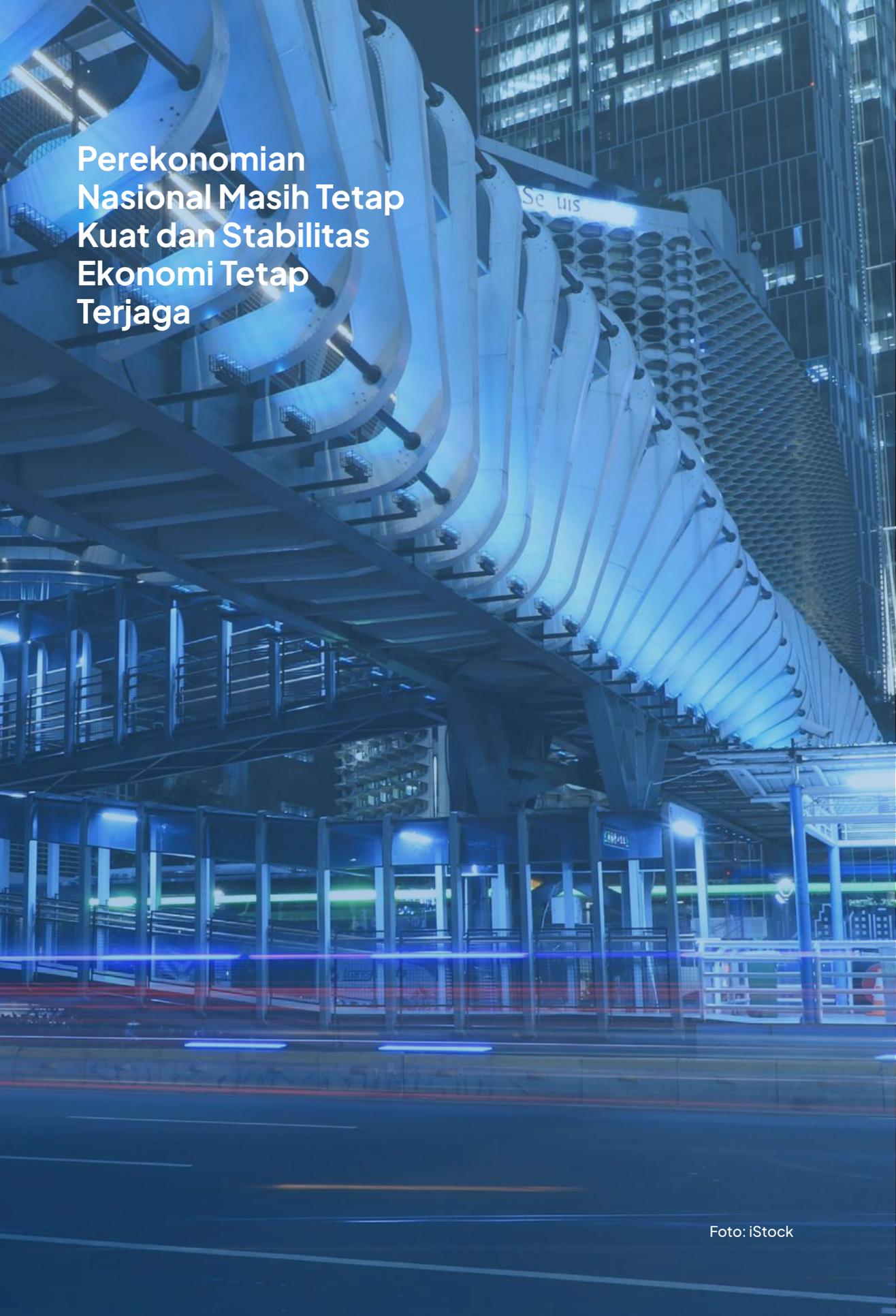
Tingginya kinerja Pendapatan dan Hibah Rp620,01 triliun dibandingkan Belanja Negara Rp611,94 triliun mendorong Keseimbangan Primer pada periode 31 Maret 2024 tercatat positif Rp122,09 triliun atau 0,53 persen PDB dan Surplus Anggaran Rp8,07 triliun atau 0,04 persen PDB.

Realisasi Pembiayaan hingga akhir Maret 2024 mencapai Rp83,96 triliun atau 16,10 persen terhadap pagu. Realisasi Pembiayaan tersebut didominasi oleh Pembiayaan Utang Rp104,66 triliun atau 16,10 persen terhadap pagu yang terdiri atas realisasi Surat Berharga Negara (Neto) Rp104,02 triliun dan Pinjaman (Neto) Rp632,20 miliar. Pinjaman (Neto) berasal dari Pinjaman Dalam Negeri (Neto) negatif Rp593,00 miliar dan Pinjaman Luar Negeri (Neto) Rp1,23 triliun. Pemerintah melakukan Penarikan Pinjaman Luar

Negeri (Bruto) Rp19,16 triliun dan Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri negatif Rp17,94 triliun.

Hingga 31 Maret 2024, realisasi Pembiayaan Investasi Rp21,61 triliun. Pemerintah juga memberikan Pinjaman Rp625,00 miliar dan merealisasikan anggaran untuk Pembiayaan Lainnya Rp296,00 miliar.

Halaman Ini Dikosongkan



**Perekonomian  
Nasional Masih Tetap  
Kuat dan Stabilitas  
Ekonomi Tetap  
Terjaga**

# Perkembangan Ekonomi Makro

**P**erkembangan ekonomi global di 2024 diperkirakan akan tetap stabil. *International Monetary Fund* (IMF) dalam *World Economic Outlook* Maret 2024 memperkirakan bahwa ekonomi global di 2024 akan tetap tumbuh 3,2 persen. Negara maju diperkirakan mengalami sedikit akselerasi pertumbuhan ekonomi, sedangkan negara berkembang akan sedikit melambat. Inflasi global diproyeksi berada pada level 5,9 persen (avg) di 2024. Di sisi lain, kondisi ketegangan geopolitik akhir-akhir ini akan mengakibatkan disrupsi rantai pasokan yang selanjutnya akan meningkatkan harga komoditas terutama komoditas energi. Di sisi domestik, perkembangan ekonomi nasional masih tetap kuat dan stabilitas ekonomi tetap terjaga. Perkembangan sektor eksternal nasional terus



**Di sisi lain, kondisi ketegangan geopolitik akhir-akhir ini akan mengakibatkan disrupsi rantai pasokan yang selanjutnya akan meningkatkan harga komoditas, terutama komoditas energi.**

memperlihatkan perkembangan positif.

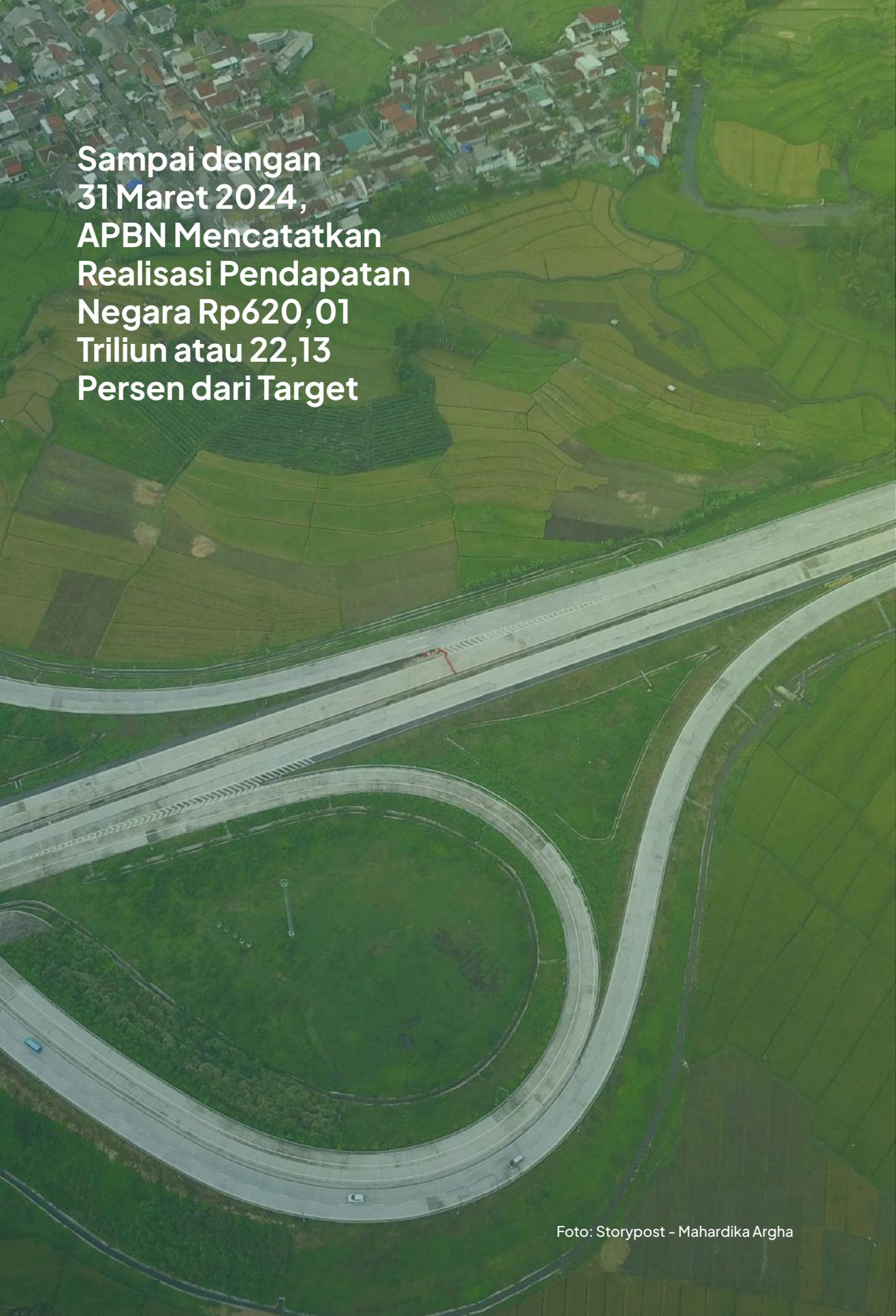
Perkembangan ekonomi nasional di Kuartal I 2024 tetap kuat didorong oleh konsumsi masyarakat dan kinerja eksternal yang tetap terjaga serta penguatan aktivitas sektor manufaktur. Perkembangan *leading indicators* (indikator penentu) yakni *Purchasing Managers' Index* (PMI) Manufaktur dan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) di Maret 2024 terus menguat. Aktivitas manufaktur Indonesia terus menunjukkan ekspansi di Maret 2024. PMI Manufaktur Indonesia tercatat masih ekspansif pada level 54,2, dari sebelumnya 52,7 (Februari 2024). Keberlanjutan kinerja positif dalam 31 bulan terakhir didorong oleh tingkat permintaan dalam negeri dan pembelian barang input yang masih berada di level ekspansi untuk mengantisipasi peningkatan permintaan selama pelaksanaan hari besar keagamaan. Pelaku bisnis juga tetap optimis terhadap prospek aktivitas produksi di 2024. Indeks Keyakinan Konsumen di Maret 2024 tercatat 123,8, menunjukkan optimisme konsumen terhadap prospek ekonomi ke depan tetap kuat. Pemerintah tetap mewaspadai ketidakpastian perkembangan ekonomi global dan akan memfokuskan upaya dalam mendukung agenda pembangunan ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan perlindungan sosial.

Dari sisi pasar keuangan, stabilitas pasar keuangan nasional tertekan di pertengahan April 2024. Pada pasar saham domestik, IHSG tercatat pada level 7.036 pada 26 April 2024. Pergerakan nilai tukar Rupiah juga mengalami tekanan dan mengacu pada Kurs Tengah Transaksi Bank Indonesia tercatat Rp16.208 per USD pada 26 April 2024. Rata-rata nilai tukar Rupiah tercatat Rp15.739 per USD hingga 26 April 2024, atau terdepresiasi 4,98

persen dibandingkan posisi nilai tukar Rupiah di awal tahun 2024. Tekanan terhadap Rupiah ini relatif terkendali dibandingkan dengan negara *peers*, seperti Malaysia, Vietnam, Thailand, dan lainnya. Perkembangan inflasi di Maret 2024 meningkat seiring peningkatan harga pangan dibulan Ramadan dan menjelang hari besar keagamaan Idul Fitri. Inflasi Maret 2024 tercatat 3,05 persen (*yoy*), naik dari Februari 2024 yang tercatat 2,75 persen. Secara bulanan, inflasi Maret 2024 tercatat 0,52 persen lebih tinggi dari Februari 2024 yang sebesar 0,37 persen (*mtm*). Posisi cadangan devisa nasional terus berada pada posisi yang kuat dalam menopang daya tahan ekonomi nasional terhadap guncangan eksternal. Posisi cadangan devisa Indonesia per akhir Maret 2024 mencapai USD140,4 miliar.

Jumlah wisatawan mancanegara (*wisman*) yang berkunjung ke Indonesia hingga Februari 2024 tetap tinggi. Kunjungan *wisman* di Indonesia mencapai 1,04 juta kunjungan di Februari 2024. *Wisman* yang berkunjung ke Indonesia pada Februari 2024 didominasi oleh *wisman* yang berasal dari Malaysia (20,66 persen), Singapura (10,89 persen), dan Tiongkok (10,16 persen). Secara kumulatif, kunjungan *wisman* pada Januari hingga Februari 2024 tercatat 1,96 juta atau meningkat 26,87 persen (*yoy*). Prospek perkembangan aktivitas pariwisata nasional akan tetap membaik dan secara langsung akan berdampak positif terhadap perkembangan sektor terkait lainnya. Sektor yang terkait dengan aktivitas pariwisata secara langsung adalah sektor makanan dan akomodasi, hotel, transportasi serta perdagangan. Sementara itu, kondisi Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel klasifikasi bintang di Indonesia pada Januari 2024 mencapai 49,45 persen, naik 1,62 poin (*yoy*).

Halaman Ini Dikосongkan

An aerial photograph showing a multi-lane highway interchange with several curved ramps. The surrounding landscape is a mix of green agricultural fields and a residential area with houses in the upper left. The text is overlaid on the top left of the image.

**Sampai dengan  
31 Maret 2024,  
APBN Mencatatkan  
Realisasi Pendapatan  
Negara Rp620,01  
Triliun atau 22,13  
Persen dari Target**

# Postur APBN

**S**ampai dengan 31 Maret 2024, APBN mencatatkan realisasi Pendapatan Negara Rp620,01 triliun atau 22,13 persen dari target. Realisasi tersebut terdiri atas:

Penerimaan Perpajakan mencapai Rp462,91 triliun atau 20,04 persen dari target, terdiri atas Penerimaan Pajak Rp393,91 triliun (19,81 persen dari target) serta Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Rp69,00 triliun (21,50 persen dari target).

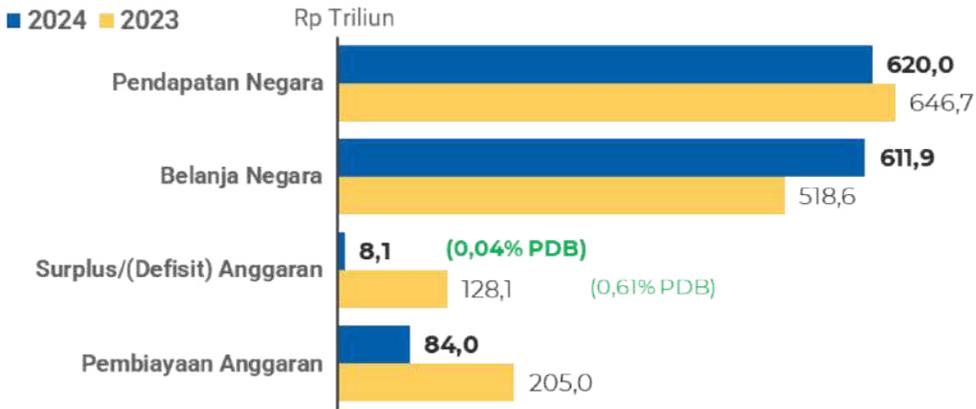
Penerimaan Negara Bukan Pajak mencapai Rp156,70 triliun atau 31,85 persen dari target.

Penerimaan Hibah mencapai Rp0,41 triliun atau 94,58 persen dari

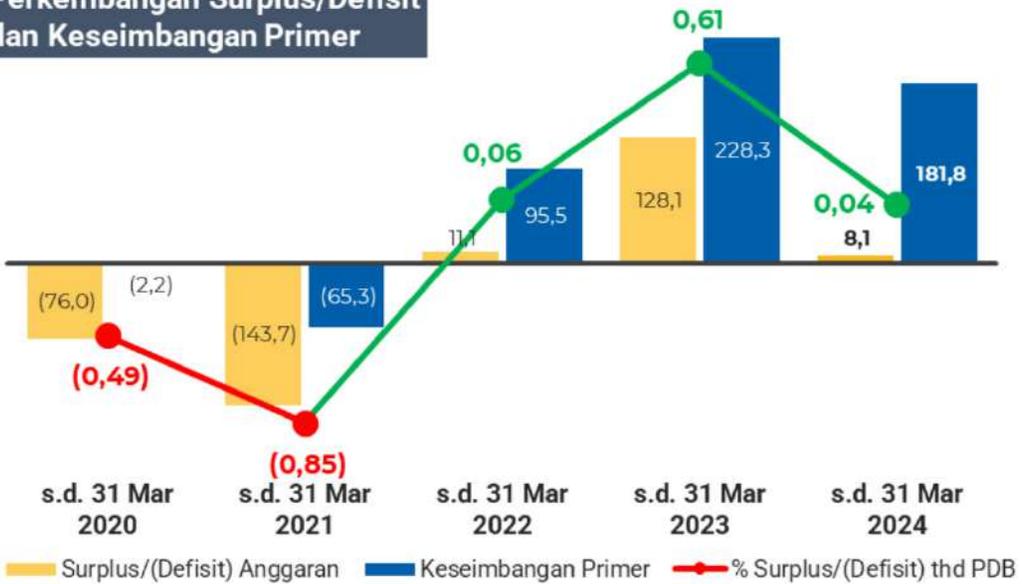


**Sementara itu, realisasi pembiayaan anggaran telah mencapai Rp83,97 triliun (16,06 persen dari target).**

**Realisasi APBN**  
s.d. 31 Januari 2023 – 2024



**Perkembangan Surplus/Defisit dan Keseimbangan Primer**



target. Di sisi Belanja Negara, realisasi sampai dengan 31 Maret 2024 mencapai Rp611,94 triliun atau 18,40 persen dari pagu. Realisasi tersebut terdiri atas: 1. Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp427,62 triliun atau 17,33 persen dari pagu, yang terdiri atas realisasi Belanja K/L Rp222,25 triliun (20,37 persen dari pagu) dan realisasi Belanja non-K/L Rp205,37 triliun (14,92 persen dari pagu). 2. Transfer ke Daerah mencapai Rp184,32 triliun atau 21,49 persen dari alokasi.

Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara dan Belanja Negara tersebut, sampai dengan 31 Maret 2024, APBN tercatat surplus Rp8,07 triliun atau 0,04 persen terhadap PDB (periode yang sama tahun 2023 surplus mencapai Rp128,09 triliun atau 0,61 persen terhadap PDB) dan keseimbangan primer juga tercatat surplus Rp122,09 triliun. Sementara itu, realisasi pembiayaan anggaran telah mencapai Rp83,97 triliun (16,06 persen dari target).

#### Realisasi Sementara APBN s.d. 31 Maret 2023 -2024

APBN (triliun rupiah)	2023			2024		
	Perpres 75/2023	Realisasi s.d. 31 Maret	% thd Perpres 75/2023	APBN	Realisasi s.d. 31 Maret	% thd APBN
<b>A. Pendapatan Negara</b>	<b>2.637,25</b>	<b>646,69</b>	<b>26,26</b>	<b>2.802,29</b>	<b>620,01</b>	<b>22,13</b>
<b>I. Pendapatan Dalam Negeri</b>	<b>2.634,15</b>	<b>646,65</b>	<b>26,26</b>	<b>2.801,86</b>	<b>619,61</b>	<b>22,11</b>
1. Penerimaan Perpajakan	2.118,35	504,17	24,94	2.309,86	462,91	20,04
a. Pajak	1.818,24	431,92	25,14	1.988,88	393,91	19,81
b. Kepabeanan dan Cukai	300,11	72,25	23,83	320,98	69,00	21,50
2. PNBPN	515,80	142,48	32,28	492,00	156,70	31,85
<b>II. Penerimaan Hibah</b>	<b>3,10</b>	<b>0,04</b>	<b>10,15</b>	<b>0,43</b>	<b>0,41</b>	<b>94,58</b>
<b>B. Belanja Negara</b>	<b>3.117,18</b>	<b>518,60</b>	<b>16,94</b>	<b>3.325,12</b>	<b>611,94</b>	<b>18,40</b>
<b>I. Belanja Pemerintah Pusat</b>	<b>2.302,46</b>	<b>347,26</b>	<b>15,46</b>	<b>2.467,53</b>	<b>427,62</b>	<b>17,33</b>
1. Belanja K/L	1.000,84	166,93	16,68	1.090,83	222,25	20,37
2. Belanja Non K/L	1.301,61	180,32	14,48	1.376,70	205,37	14,92
<b>II. Transfer Ke Daerah</b>	<b>814,72</b>	<b>171,34</b>	<b>21,03</b>	<b>857,59</b>	<b>184,32</b>	<b>21,49</b>
<b>C. Keseimbangan Primer</b>	<b>(38,53)</b>	<b>228,34</b>	<b>(145,67)</b>	<b>(25,51)</b>	<b>122,09</b>	<b>(478,67)</b>
<b>D. Surplus/(Defisit) Anggaran</b>	<b>(479,93)</b>	<b>128,09</b>	<b>(21,42)</b>	<b>(522,83)</b>	<b>8,07</b>	<b>(1,54)</b>
<b>% Surplus/(Defisit) thd PDB</b>	<b>(2,27)</b>	<b>0,61</b>		<b>(2,29)</b>	<b>0,04</b>	
<b>E. Pembiayaan Anggaran</b>	<b>479,93</b>	<b>205,01</b>	<b>34,27</b>	<b>522,83</b>	<b>83,97</b>	<b>16,06</b>

A nighttime photograph of a city skyline. In the foreground, two prominent skyscrapers with curved, metallic facades are illuminated from within, showing glowing windows. The background is filled with other tall buildings, some with lights on, and a large, ornate building with a domed roof and many lit windows. The overall scene is a vibrant, illuminated urban environment.

**Triwulan I 2024,  
Realisasi Penerimaan  
Pajak Mencapai 19,81  
Persen dari Target  
APBN**

Foto: Unsplash - Chintya Akemi

# Penerimaan Pajak

**S**ampai dengan akhir Triwulan I 2024, atau periode 1 Januari – 31 Maret 2024, penerimaan pajak terkumpul Rp393,91 triliun. Penerimaan ini setara dengan 19,81 persen dari target yang ditetapkan Rp1.988,88 triliun. Penerimaan pajak mengalami perlambatan pada periode ini. Secara neto, penerimaan pajak mencatatkan pertumbuhan negatif 8,80 persen (yoy), sedangkan pertumbuhan bruto masih mampu tumbuh positif (0,64 persen yoy).

Berdasarkan kelompok pajaknya, penurunan realisasi dialami oleh seluruh kelompok pajak selain PBB dan Pajak Lainnya. Kelompok PPh Nonmigas mencatat realisasi Rp220,42 triliun atau 20,73 persen dari target. Kinerja PPh Nonmigas



**Secara umum, kinerja penerimaan pajak Triwulan I 2024 tidak terlepas dari pengaruh kondisi pertumbuhan ekonomi global yang cenderung melemah dan divergen.**

## Realisasi Penerimaan Pajak s.d. 31 Maret 2024

Uraian	Target APBN 2024 (Triliun)	1 Januari s.d. 31 Maret 2024				
		Realisasi Neto (Triliun)	Kontribusi (%)	Capaian (%)	Growth Neto (% yoy)	Growth Bruto (% yoy)
Pajak Penghasilan	1139,78	234,95	59,65	20,61	-3,32	-1,18
- Non Migas	1063,41	220,42	55,96	20,73	-2,16	0,10
- Migas	76,37	14,53	3,69	19,02	-18,06	-18,06
PPN & PPnBM	811,36	155,79	39,55	19,20	-16,25	2,57
PBB dan Pajak Lainnya	37,73	3,17	0,80	8,39	10,34	11,05
<b>Jumlah</b>	<b>1988,88</b>	<b>393,91</b>	<b>100,00</b>	<b>19,81</b>	<b>-8,80</b>	<b>0,64</b>

mengalami tekanan dari penurunan realisasi PPh Badan. Di sisi lain, seluruh jenis pajak lainnya yang termasuk ke dalam kelompok PPh Nonmigas mengalami pertumbuhan positif.

Sejalan dengan kinerja PPh Nonmigas, kelompok PPN dan PPnBM sebagai komponen terbesar kedua juga menurun. Secara nominal, PPN dan PPnBM membukukan realisasi Rp155,79 triliun atau 19,20 persen dari target. Kinerja kelompok pajak ini mengalami tekanan dari kinerja PPN dan PPnBM Dalam Negeri serta PPN Impor.

Kemudian, PPh Migas yang berkontraksi sejak awal tahun telah mencapai 19,02 persen dari target atau Rp14,53 triliun. Sementara itu, realisasi PBB dan Pajak Lainnya mencapai 8,39 persen dari target dan mengalami pertumbuhan positif.

Secara umum, kinerja penerimaan pajak Triwulan I 2024 tidak terlepas dari pengaruh kondisi pertumbuhan ekonomi global yang cenderung melemah dan divergen, disertai dengan ketegangan geopolitik dan penurunan harga komoditas. Penurunan penerimaan pajak pada periode ini khususnya disebabkan oleh dua hal, meliputi (1) peningkatan restitusi (pengembalian kelebihan pembayaran pajak), terutama restitusi pada dua bulan pertama yang signifikan dan (2) penurunan

penerimaan pajak penghasilan dari Sektor Pertambangan, terutama usaha pertambangan batu bara sebagai akibat penurunan harga batubara pada 2023.

### KINERJA JENIS PAJAK UTAMA

Bila dilihat lebih dalam berdasarkan jenis pajaknya, secara umum kinerja jenis pajak utama mencatatkan pertumbuhan positif. Bahkan beberapa di antaranya mencapai pertumbuhan *double digits*, yakni PPh Pasal 21 dan PPh Final. Selain kedua jenis pajak tersebut, PPh Pasal 26 dan PPh OP juga menutup kuartal pertama 2024 dengan kinerja yang baik.

Sampai dengan 31 Maret 2024, realisasi PPh Pasal 26 mencapai Rp15,45 triliun atau tumbuh 1,61 persen (yoy), meskipun sempat mengalami tekanan pada penerimaan Februari 2024. Kinerja PPh Pasal 26 ditopang oleh peningkatan setoran pajak penghasilan atas bunga dan royalti ke luar negeri. Kemudian, PPh OP terealisasi Rp8,59 triliun dengan pertumbuhan 9,19 persen (yoy). Kinerja PPh OP didorong oleh peningkatan penerimaan setoran angsuran masa tahun berjalan dan setoran untuk pembayaran pajak yang harus dibayar dan tercantum dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 2023.

Secara kumulatif, realisasi PPh Pasal 21 mencapai Rp62,86 triliun atau tumbuh 25,88 persen (yoy). Realisasi PPh Pasal



## Selain PPh Pasal 21 dan PPh Final, jenis pajak PPh Pasal 26 dan PPh OP juga menutup kuartal pertama 2024 dengan kinerja yang positif

21 selama Triwulan I 2024 konsisten tumbuh sekitar dua puluh persen setiap bulannya. Kinerja positif ini sejalan dengan utilisasi tenaga kerja serta gaji dan upah yang terjaga. Sementara itu, realisasi PPh Final mengalami pertumbuhan signifikan mulai Februari dan berlanjut hingga Maret. Dengan demikian, realisasi kumulatif PPh Final mencapai Rp32,83 triliun atau tumbuh 13,09 persen (yoy). Kinerja PPh Final ditopang oleh peningkatan pembayaran pajak penghasilan atas bunga deposito/tabungan serta penghasilan atas jasa konstruksi.

Di sisi lain, realisasi PPh Badan dan PPN Dalam Negeri masih mengalami perlambatan hingga akhir Triwulan I 2024. PPN Dalam Negeri sebagai penyumbang penerimaan terbesar terealisasi Rp87,04 triliun. Sementara itu, PPh Badan sebagai kontributor terbesar keempat terealisasi Rp57,31 triliun. Realisasi penerimaan kedua jenis pajak tersebut terkoreksi oleh restitusi masing-masing yang mengalami peningkatan. Selain restitusi, penurunan pajak penghasilan tahunan dari wajib pajak yang bergerak di bidang pertambangan turut melemahkan kinerja PPh Badan pada periode ini.

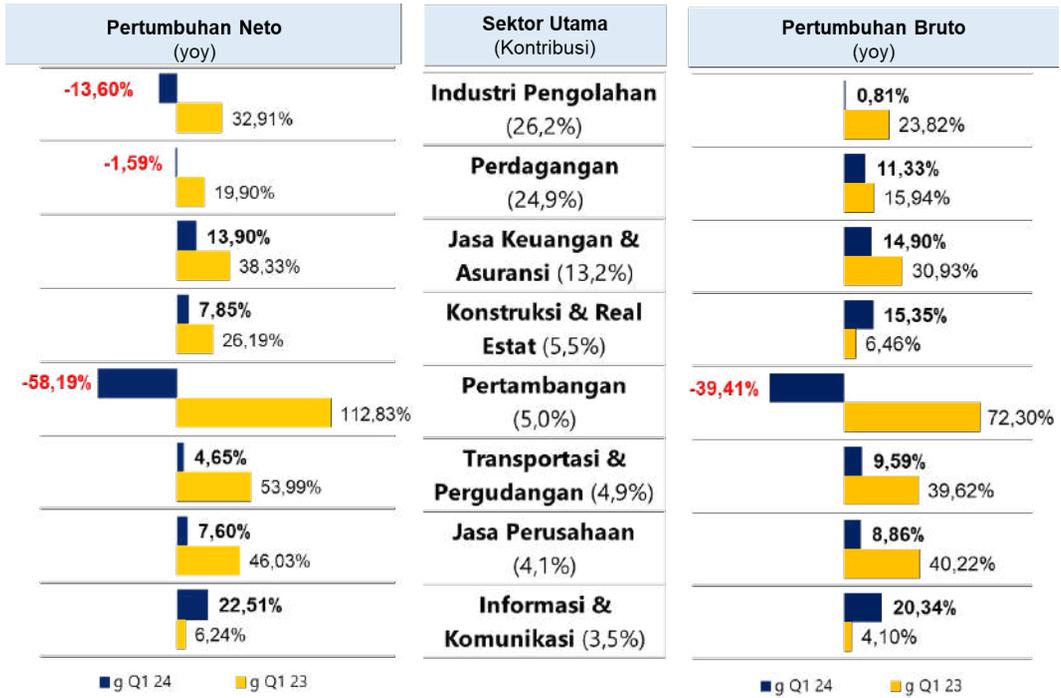
Beralih ke pajak-pajak atas impor yang berperan signifikan terhadap penerimaan yaitu PPN Impor dan PPh Pasal 22 Impor. Secara berurutan, realisasi jenis pajak tersebut mencapai Rp61,38 triliun dan Rp19,05 triliun. Kinerja pajak atas impor ini melambat di Maret 2024, sehingga menekan pertumbuhan realisasi kumulatif Triwulan I 2024. Sampai dengan 31 Maret 2024, realisasi PPh 22 Impor tumbuh 2,29 persen (yoy), sedangkan PPN Impor turun 2,80 persen (yoy).

### KINERJA SEKTOR UTAMA

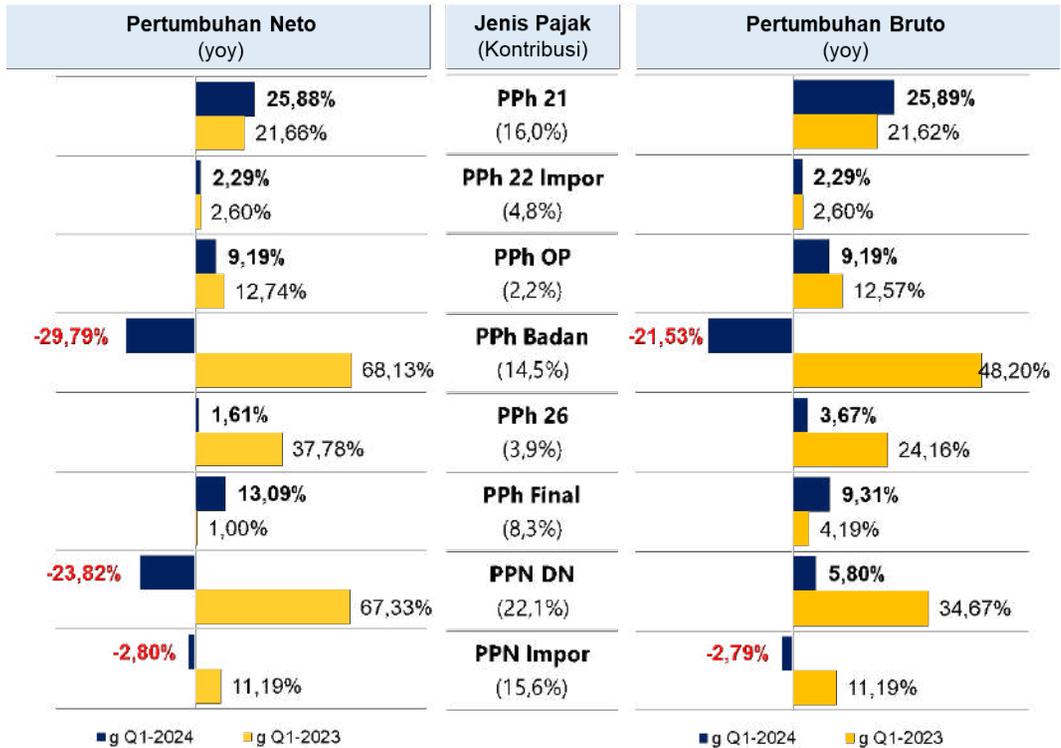
Secara kumulatif, mayoritas sektor utama mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan sektor non-komoditas yang positif menunjukkan resiliensi *underlying economic activity*. Namun, beberapa sektor utama yang terkait dengan komoditas mengalami tekanan dari penurunan signifikan atas harga komoditas pada 2023. Selain mengakibatkan peningkatan restitusi, penurunan harga ini juga mempengaruhi laba usaha wajib pajak di 2023 yang menjadi dasar perhitungan angsuran masa tahun 2024 dan pajak penghasilan tahunan 2023. Oleh karena itu, realisasi PPh Badan 2024 sektor terkait komoditas turut mengalami penurunan. Sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan komoditas, yaitu Sektor Industri Pengolahan, Sektor Perdagangan, dan Sektor Pertambangan.

Realisasi penerimaan Sektor Industri Pengolahan, Sektor Perdagangan, dan Sektor Pertambangan pada Triwulan I 2024 mengalami perlambatan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Akan tetapi, kinerja penerimaan bruto Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Perdagangan tercatat tumbuh positif. Secara lebih rinci, realisasi Sektor Industri Pengolahan mencapai 26,19 persen terhadap penerimaan pajak nasional. Realisasi sektoral berkontraksi 13,60

Penerimaan Pajak Sektoral



Penerimaan Jenis-Jenis Pajak Utama



persen (yoy). Penerimaan sektor Industri Pengolahan, utamanya mendapat tekanan dari kinerja sub sektor Industri Sawit, dan Industri Logam Dasar.

Kemudian, penerimaan Sektor Perdagangan membukukan realisasi 24,87 persen dari penerimaan pajak nasional. Realisasi sektoral mengalami sedikit penurunan akibat kinerja penerimaan perdagangan besar bahan bakar gas, cair, dan padat serta produk sejenisnya. Meskipun begitu, pertumbuhan bruto Sektor Perdagangan tercatat *double digits* yang didukung oleh konsumsi dalam negeri yang kuat.

Selanjutnya, Sektor Pertambangan mencatat penerimaan 5,02 persen dari penerimaan pajak nasional. Realisasi sektor ini mengalami kontraksi penerimaan terdalam dibandingkan dengan sektor lainnya. Penurunan penerimaan sektoral terutama terjadi pada usaha pertambangan batubara dan pertambangan bijih logam.

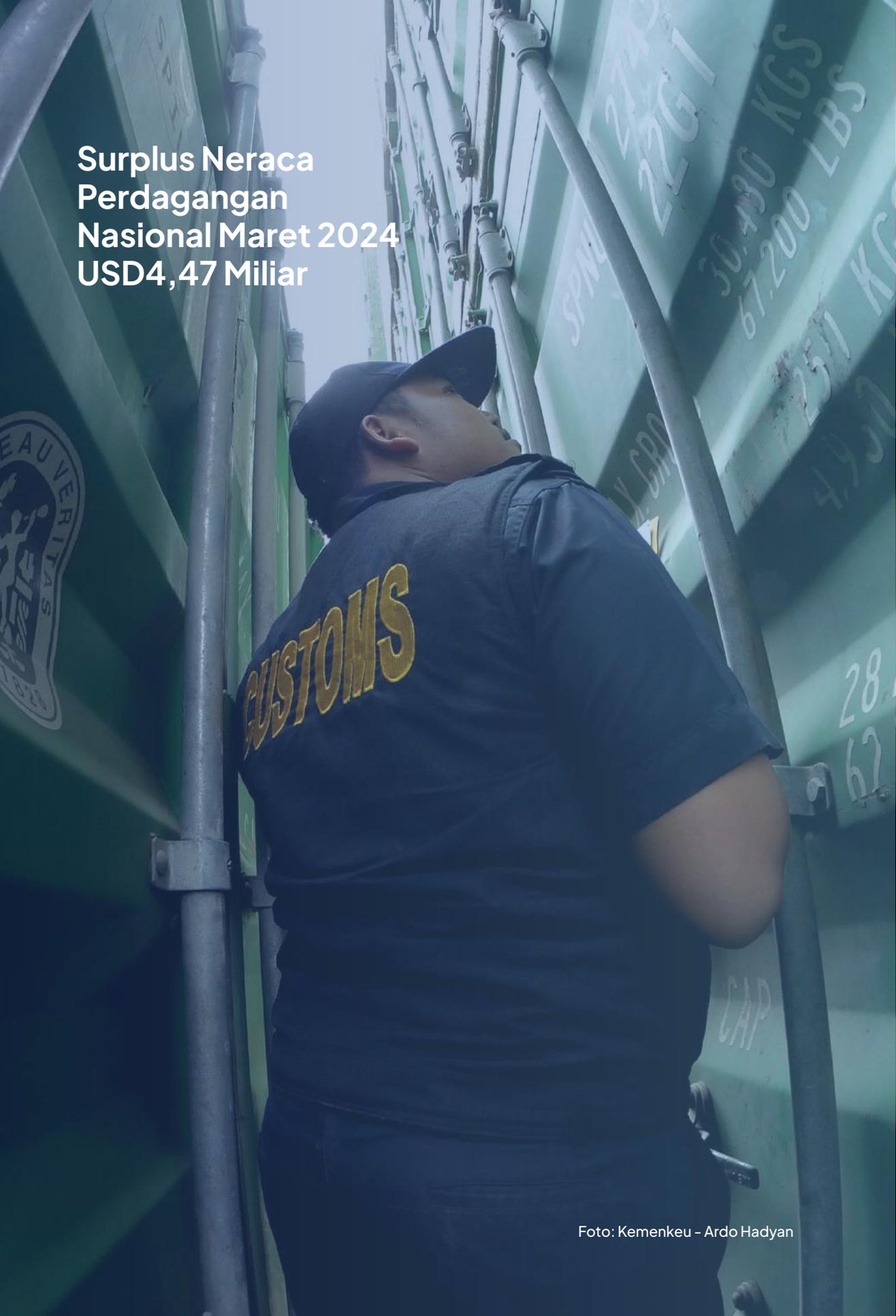
Sementara itu, sektor-sektor pada bidang jasa mengalami pertumbuhan positif pada Triwulan I 2024. Pertumbuhan tertinggi dialami oleh Sektor Informasi dan Komunikasi (22,51 persen yoy) dan terendah dialami oleh Sektor Transportasi dan Pergudangan (4,65 persen yoy). Kinerja Sektor Informasi dan Komunikasi didukung oleh peningkatan realisasi penerimaan pada setiap sub sektornya, terutama aktivitas telekomunikasi tanpa kabel.

Sebagai sektor dengan pertumbuhan tertinggi kedua, Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi mengumpulkan realisasi hingga 13,90 persen dari penerimaan pajak nasional. Kinerja penerimaan pajak sektor tumbuh sejalan dengan stabilitas sektor jasa keuangan nasional yang terjaga.



## **Sektor-sektor pada bidang jasa mengalami pertumbuhan positif pada Triwulan I 2024. Tertinggi dialami oleh Sektor Informasi dan Komunikasi (22,51 persen yoy).**

Kemudian, penerimaan Sektor Konstruksi dan *Real Estate* tumbuh 7,85 persen (yoy) yang didukung oleh kinerja positif penerimaan sub sektor *real estate* yang dimiliki sendiri atau disewa dan sub sektor konstruksi gedung. Sektor Jasa Perusahaan tumbuh 7,60 persen (yoy), didorong oleh capaian tiap sub sektornya, terutama aktivitas konsultasi manajemen. Terakhir, Sektor Transportasi dan Pergudangan tumbuh 4,65 persen (yoy), didorong oleh capaian penerimaan dari sub sektor angkutan udara serta angkutan darat.



**Surplus Neraca  
Perdagangan  
Nasional Maret 2024  
USD4,47 Miliar**

Foto: Kemenkeu – Ardo Hadyan

# Penerimaan Kepabeanaan & Cukai

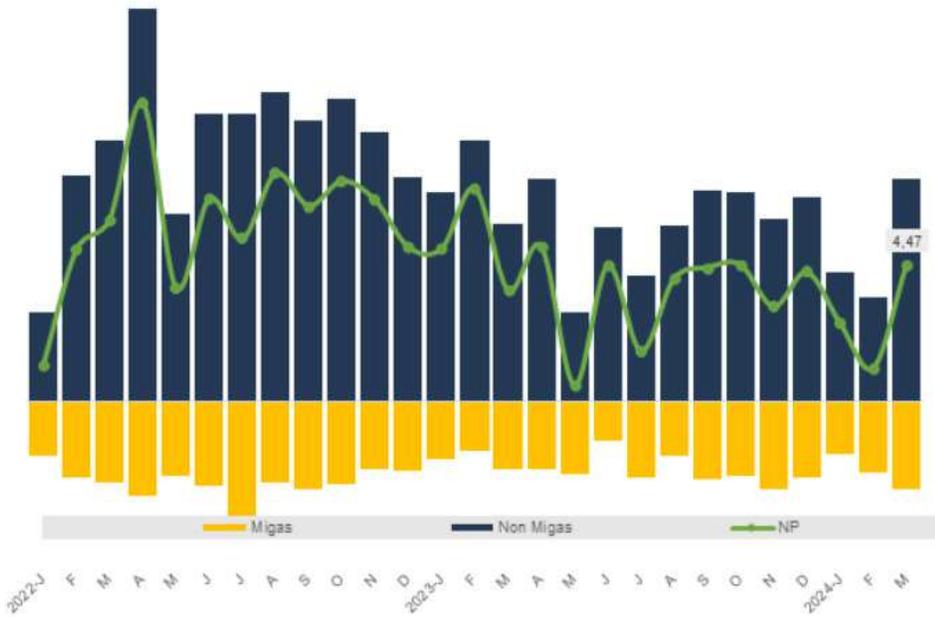
**K**inerja neraca perdagangan pada Maret 2024 dibuka dengan surplus USD4,47 miliar. Surplus ini berdampak positif pada cadangan devisa dan melanjutkan tren yang telah terjadi sejak Mei 2020. Dengan demikian, secara total, Neraca Perdagangan Indonesia Kuartal I 2024 surplus USD7,31 miliar. Hal tersebut merupakan indikator yang menggembirakan bagi kinerja perekonomian Indonesia. Untuk menjaga keberlanjutan tren positif ini, kinerja perdagangan internasional perlu terus dipantau dan dikawal.

Surplus neraca terutama terjadi pada Nonmigas sedangkan Migas masih defisit. Kinerja positif neraca Nonmigas didukung oleh komoditas SDA seperti batubara dan minyak goreng kelapa sawit. Selain itu, sektor manufaktur terutama logam dasar seperti besi, baja



**Meskipun volume perdagangan telah meningkat, kinerja ekspor masih menunjukkan penurunan. Hal tersebut lebih dipengaruhi oleh penurunan harga.**

Grafik Neraca Perdagangan Indonesia  
2020–2023 (dalam USD miliar)



Realisasi Penerimaan Kepabeanaan  
dan Cukai (dalam triliun Rupiah)

No.	Jenis Penerimaan	Target APBN	Realisasi		Growth (y-o-y, %)		% Capaian
			2023	2024	2023	2024	
1	BEA MASUK	57,37	12,32	11,85	9,00%	-3,82%	20,65%
2	CUKAI	246,08	56,90	53,00	-0,72%	-6,86%	21,54%
	Hasil Tembakau	230,41	55,24	51,20	-0,74%	-7,30%	22,22%
	Ethil Alkohol	0,10	0,03	0,03	-20,88%	16,21%	31,43%
	MMEA	9,33	1,61	1,72	0,58%	6,58%	18,42%
	Denda Adm. Cukai	-	0,02	0,03	-8,96%	111,29%	-
	Cukai Lainnya	-	0,01	0,01	-15,42%	27,20%	-
	Plastik	1,85	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	MBDK	4,39	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
3	BEA KELUAR	17,53	3,03	4,16	-71,66%	37,01%	23,71%
	<b>TOTAL</b>	<b>320,98</b>	<b>72,25</b>	<b>69,00</b>	<b>-8,91%</b>	<b>-4,50%</b>	<b>21,50%</b>
	PPN Impor		63,15	61,38	11,19%	-2,80%	
	PPn BM Impor		1,19	1,35	59,68%	13,91%	
	PPh Pasal 22 Impor		18,63	19,05	2,60%	2,29%	
	Total PDRI lainnya		82,97	81,79	9,60%	-1,42%	
	<b>TOTAL DJBC + PERPAJAKAN</b>		<b>155,22</b>	<b>150,79</b>	<b>0,13%</b>	<b>-2,85%</b>	

Sumber: DJPB 5 April 2024



**Penurunan paling signifikan terjadi pada ekspor minyak goreng kelapa sawit dan batubara, masing-masing turun 28,6 persen dan 19,7 persen.**

dan bijih tembaga juga memberikan kontribusi penting dalam menciptakan surplus tersebut. Di sisi lain neraca Migas masih defisit, terutama disebabkan oleh impor bahan bakar dan minyak bumi.

Meskipun volume perdagangan telah meningkat, kinerja ekspor masih menunjukkan penurunan. Hal tersebut lebih dipengaruhi oleh penurunan harga. Tren harga komoditas terpantau masih menurun pada Februari dan merupakan kelanjutan dari moderasi harga setelah *commodity boom* yang terjadi pada 2022.

Pada Maret 2024, ekspor mencapai USD22,43 miliar, terkontraksi 4,19 persen (yoy), penurunan terjadi pada sektor Nonmigas maupun Migas. Kinerja sektor Nonmigas mengalami penurunan, kali ini mencapai 4,21 persen (yoy). Penurunan paling signifikan terjadi pada ekspor minyak goreng kelapa sawit dan batubara, masing-masing turun 28,6 persen dan 19,7 persen. Sedangkan pada sektor Migas, ekspor turun 3,95 persen (yoy), akibat penurunan ekspor gas alam ke Tiongkok dan Jepang serta ekspor minyak bumi ke Thailand.

Sementara itu, impor mencapai USD17,96 miliar turun 12,76 persen (yoy), terutama pada sektor Nonmigas sedangkan sektor Migas masih tumbuh. Impor Nonmigas turun 16,72 persen (yoy) dipengaruhi penurunan impor komoditas utama seperti besi dan baja dasar, bahan baku plastik serta komponen elektronik. Sedangkan impor Migas tumbuh 10,34 persen (yoy) didorong oleh pertumbuhan impor bensin, minyak bumi, solar dan avtur.

**REALISASI PENERIMAAN KEPABEANAN DAN CUKAI**

Hingga 31 Maret 2024, realisasi Penerimaan Kepabebean dan Cukai mencapai Rp69,00 triliun atau 21,50 persen dari Target. Penerimaan total terkontraksi 4,50 persen (yoy), terutama dari penerimaan CHT dan BM, sedangkan penerimaan BK masih tumbuh cukup signifikan.

Realisasi Penerimaan PDRI lainnya mencapai Rp81,79 triliun atau turun 1,42 persen (yoy). Sehingga Penerimaan Negara yang telah dikumpulkan dari Kepabebean dan Cukai serta PDRI lainnya mencapai Rp150,79 triliun atau turun 2,85 persen (yoy).

Dari sisi Penerimaan, kinerja BM turun 3,82 persen (yoy) menjadi Rp11,85 T atau tercapai 20,65 persen target. Kinerja BM dipengaruhi oleh penurunan penerimaan dari komoditas utama seperti kendaraan roda empat termasuk suku cadangnya, gas alam maupun buatan, dan mesin penambangan serta konstruksi.

Penerimaan BK mencapai Rp4,16 triliun atau 23,71 persen dari target atau tumbuh 37,01 persen (yoy). Peningkatan tersebut berasal dari BK Tembaga, sedangkan penerimaan dari CPO masih terus mengalami penurunan. BK Mineral tumbuh signifikan mencapai



## **Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) golongan 1, yang memiliki tarif tinggi, turun lebih dalam sehingga berdampak pada tarif yang rendah.**

lebih lima kali lipat, dipengaruhi oleh relaksasi ekspor tembaga. Sedangkan penerimaan BK produk sawit turun 68,80 persen (yoy) dipengaruhi oleh penurunan volume ekspor dan harga.

Cukai merupakan mesin utama Penerimaan Kepabeanan dan Cukai, dengan penerimaan Rp53,00 triliun atau 21,54 persen dari target. Kinerja tersebut berkontraksi 6,86 persen (yoy) dipengaruhi oleh penurunan CHT sedangkan penerimaan dari Etil Alkohol (EA) dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) masih tumbuh.

Penerimaan CHT berkontraksi 7,30 persen (yoy) menjadi Rp51,20 triliun atau 22,22 persen dari target. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh basis produksi HT pada November dan Desember 2023 dan adanya pelunasan maju. Pada periode tersebut baik produksi dan tarif efektif menurun. Penurunan produksi Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) golongan 1, yang memiliki tarif tinggi, turun

lebih dalam sehingga berdampak pada tarif yang rendah. Sedangkan pelunasan maju terjadi karena adanya penerimaan yang jatuh tempo pada hari libur 1 Januari 2024 sehingga harus dilunasi maju pada Desember 2023.

Penerimaan Cukai MMEA naik 6,58 persen (yoy) menjadi Rp1,72 triliun, mencapai 18,42 persen dari target. Kenaikan ini didorong oleh kebijakan kenaikan tarif MMEA dan peningkatan produksi 2,11 persen (yoy) terutama dari Golongan A. Minuman Mengandung Etil Alkohol Golongan A merupakan kelompok minuman beralkohol dengan kadar paling rendah sampai dengan 5 persen dan memiliki produksi terbesar dibanding golongan lainnya.

Sementara itu, kinerja Penerimaan Cukai EA naik 16,21 persen (yoy) menjadi Rp33,60 miliar atau 31,43 persen dari target. Peningkatan kinerja tersebut dikarenakan oleh peningkatan produksi EA bayar 19,67 persen. Namun demikian perlu diketahui bahwa sebagian besar EA yang diproduksi, yang mencapai 96,64 persen tidak dipungut cukainya atau dibebaskan untuk keperluan medis, industri atau fasilitas lainnya.

Halaman Ini Dikосongkan

# Tren Positif Pendapatan Sektor Perikanan Sejak Diberlakukan Mekanisme Pascaproduksi



Foto: Storypost - Ahmad Z. Fariza

# Penerimaan Negara Bukan Pajak

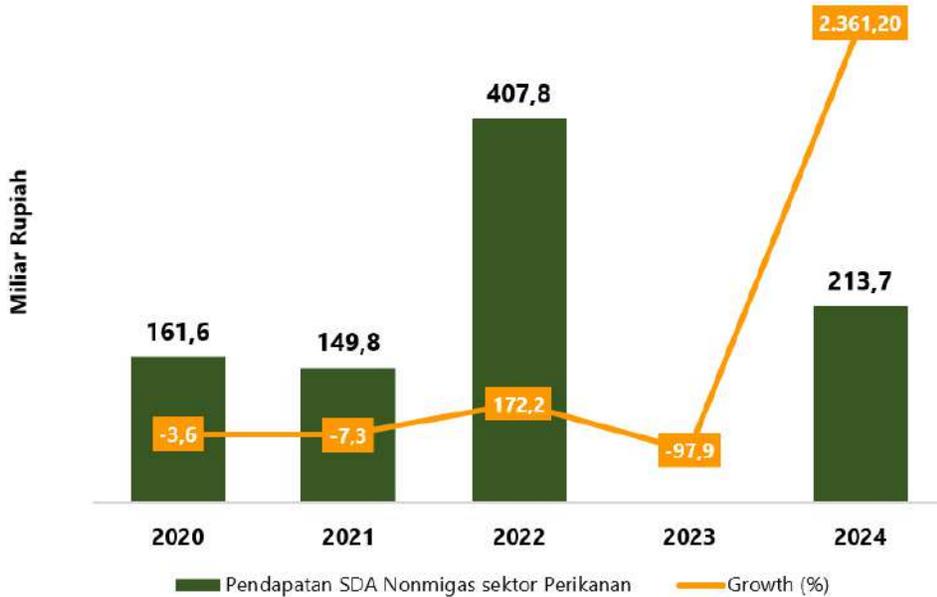
**M**oderasi harga komoditas di pasaran hingga akhir Maret 2024 masih berlanjut. Pelemahan realisasi *lifting* minyak dan gas bumi serta volume produksi batubara menjadi faktor dominan yang semakin menekan capaian PNBPN periode Januari sampai dengan Maret 2024. Realisasi PNBPN tercatat Rp156,69 triliun, 31,85 persen dari target, meningkat 9,98 persen (yoy). Pendapatan KND menjadi kontributor utama yang mendorong pertumbuhan positif PNBPN hingga Maret 2024 sebesar 9,98 persen (yoy).

Pendapatan SDA mencapai Rp53,50 triliun, 25,76 persen dari target. Realisasi Pendapatan SDA Migas



**Pendapatan KND  
menjadi kontributor  
utama yang mendorong  
pertumbuhan  
positif PNBPN hingga  
Maret sebesar 9,98  
persen (yoy).**

**Perkembangan Pendapatan SDA Nonmigas  
Sektor Perikanan periode Januari s.d. Maret, 2020–2024**



melambat dibandingkan periode yang sama 2023. Perlambatan ini terutama disebabkan oleh moderasi harga minyak mentah Indonesia (ICP) serta lifting minyak dan gas bumi yang menurun. Beberapa faktor yang menyebabkan harga ICP menurun antara lain gangguan pasokan minyak akibat ketegangan di Timur Tengah dan perkiraan permintaan minyak untuk 2024 yang menurun. Sementara itu, penurunan lifting minyak bumi disebabkan oleh tingkat penurunan alamiah sumur migas yang tinggi sejalan dengan fasilitas produksi migas utama yang telah menua. Pada periode Desember 2023 sampai dengan Februari 2024, rata-rata ICP turun 0,71 persen (yoy), lifting minyak bumi turun 5,56 persen (yoy), dan lifting gas bumi turun 6,59 persen (yoy).

Realisasi Pendapatan SDA Nonmigas mencapai Rp27,84 triliun, 28,55 persen dari target. Realisasi ini melambat dibandingkan periode yang sama tahun 2023. Perlambatan kinerja tersebut terutama disumbang oleh sektor Pertambangan Minerba. Adapun

sektor Kehutanan, sektor Perikanan, dan sektor Panas Bumi menunjukkan kinerja positif dan peningkatan signifikan dibandingkan periode yang sama tahun 2023. Bahkan sektor Perikanan tercatat tumbuh 2.361,23 persen (yoy).

Pendapatan sektor Minerba mencapai Rp25,63 triliun, 29,85 persen dari target. Realisasi ini menurun dibandingkan periode yang sama tahun 2023. Faktor penurunan Harga Batubara Acara (HBA) dan Harga Mineral Acuan di pasaran menyebabkan penurunan pendapatan sektor Minerba. Dampak penurunan harga menyebabkan royalti batubara turun 45,50 persen (yoy), nikel turun 53,18 persen (yoy), dan royalti timah turun 57,94 persen (yoy). Di samping itu, penurunan volume produksi batubara juga turut mengurangi pendapatan sektor Minerba. Volume produksi batubara periode Januari sampai dengan Maret 2024 tercatat turun 3,89 persen (yoy).

Pendapatan sektor Kehutanan mencapai Rp1,57 triliun, 26,23 persen



## **Kenaikan PNPB juga disumbang dari pendapatan denda pada Kementerian ESDM, serta penerimaan kembali Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) pada Kementerian PUPR dan Kementerian Sosial.**

dari target. Capaian ini meningkat dibandingkan periode Januari sampai dengan Maret 2023 disebabkan oleh peningkatan jumlah produksi kayu bulat sebanyak 627.623 m<sup>3</sup> dari 25.218.409 m<sup>3</sup> pada periode Januari sampai dengan Maret 2023 menjadi 25.846.032 m<sup>3</sup> pada periode yang sama tahun 2024.

Sementara itu, realisasi sektor Perikanan Rp213,71 miliar, mencapai 6,11 persen dari target. Kinerja sektor Perikanan tumbuh 2.361,20 persen (yoy) sebagai dampak meningkatnya pembayaran Pendapatan Pungutan Hasil Perikanan (PHP) yang sudah menggunakan mekanisme pascaproduksi

Perubahan tata kelola menjadi mekanisme pascaproduksi yang diberlakukan sejak 1 Januari 2023 mulai menunjukkan hasil sejak awal tahun 2024. Pendapatan PHP (salah satu kontributor Pendapatan SDA

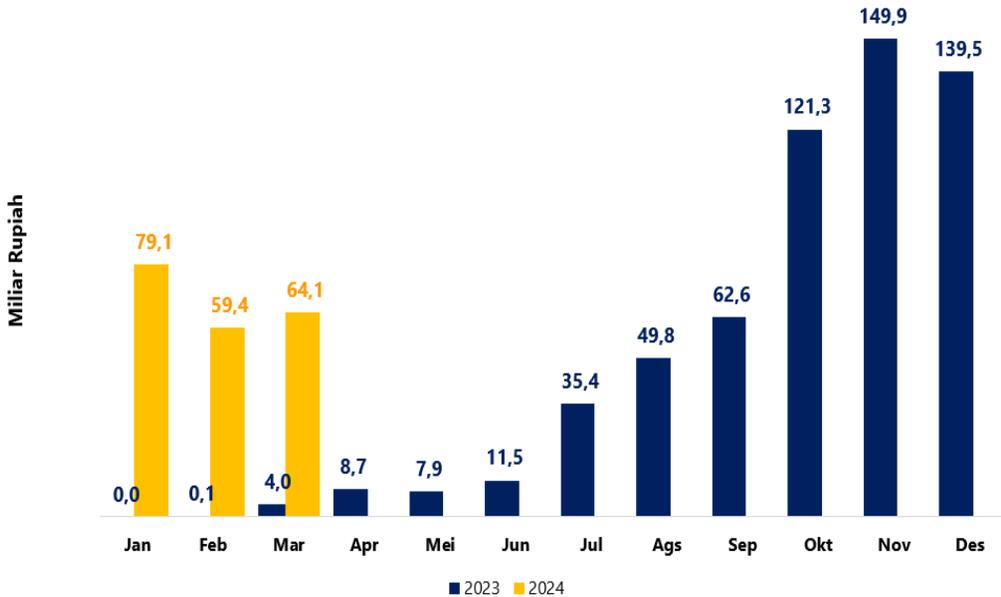
Nonmigas sektor Pertanian) per bulan pada triwulan I tahun 2024 jauh lebih tinggi dibandingkan bulan yang sama tahun 2023. Perhitungan Pendapatan PHP dihitung berdasarkan pada riil setiap volume ikan yang ditangkap pada setiap kegiatan penangkapan ikan. Volume produksi ikan pada kapal perikanan (dengan izin Pemerintah Pusat) periode Januari sampai dengan Maret 2024 mencapai 270,38 ton. Meningkat signifikan dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2023 yang hanya mencapai 10 ton. Sejak 1 Januari 2024, seluruh kapal perikanan telah memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) pascaproduksi.

Selanjutnya, capaian sektor Panas Bumi tercatat Rp431,45 miliar, tercapai 19,83 persen dari target. Realisasi ini tumbuh 72,63 persen (yoy) yang disebabkan meningkatnya Setoran Bagian Pemerintah (SBP) sebesar 49,75 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023 di hampir seluruh area milik Pertamina *Geothermal Energy* (PGE) dan *Star Energy Geothermal* (SEG).

Realisasi Pendapatan KND mencapai Rp42,89 triliun, 49,97 persen dari target. Perekonomian nasional yang pulih pada 2023 mendatangkan profit signifikan bagi BUMN khususnya BUMN Perbankan. Kontributor utama capaian Pendapatan KND Maret 2024 berasal dari pembayaran dividen interim BRI dan Mandiri tahun buku 2023.

Capaian realisasi PNPB Lainnya mencapai Rp42,43 triliun, 36,85 persen dari target. Kinerja PNPB Lainnya melambat 4,40 persen (yoy) disebabkan kontraksi atas Pendapatan Penjualan Hasil Tambang (PHT) dampak penurunan HBA dan volume produksi batubara. Meski Pendapatan PNPB K/L tumbuh positif, namun belum mampu

**Perkembangan Pendapatan Pungutan Hasil Perikanan, 2023-2024**



menutupi kontraksi Pendapatan PHT.

Pendapatan PNBP K/L mencapai Rp33,98 triliun, 42,15 persen dari target. Capaian ini tumbuh sebesar 12,12 persen (yoy) yang terutama berasal dari pendapatan nonlayanan berupa denda dari Kementerian ESDM (mayoritas berasal dari denda dana kompensasi batubara). Di samping itu, terdapat pendapatan layanan yang tumbuh positif antara lain dari Pendapatan Jasa Transportasi Kemenhub tumbuh 28,20 persen (yoy) dan Pendapatan Layanan Administrasi Hukum dari Kemenkumham tumbuh 11,88 persen (yoy).

Realisasi Pendapatan BLU mencapai Rp17,87 triliun, 21,44 persen dari target. Capaian tersebut didominasi dari pendapatan Non Kelapa Sawit yang tumbuh 33,95 persen (yoy) terutama bersumber dari jasa pelayanan Rumah Sakit di beberapa K/L dan pendapatan jasa pelayanan

pendidikan. Sementara itu, Pendapatan BLU Sawit mencapai Rp4,23 triliun atau turun 47,36 persen (yoy).

Halaman Ini Dikosongkan

**Realisasi BPP  
Terutama  
Dimanfaatkan  
untuk Penyaluran  
Bantuan Masyarakat,  
Pelaksanaan Pemilu,  
serta Pemenuhan  
Kewajiban  
Pemerintah**



# Belanja Pemerintah Pusat

**R**ealisasi BPP mencapai Rp427,62 triliun (17,33 persen terhadap pagu). Realisasi BPP terutama digunakan untuk penyaluran bantuan sosial dan pelaksanaan pemilu. Selain itu, realisasi BPP tersebut juga dipengaruhi oleh pembayaran kewajiban pemerintah seperti gaji dan tunjangan pegawai serta pembayaran manfaat pensiun termasuk THR.

## **BELANJA K/L**

Realisasi Belanja K/L mencapai Rp222,25 triliun (20,37 persen dari pagu). Realisasi Belanja K/L terutama dimanfaatkan untuk penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH),



**Realisasi BPP dimanfaatkan antara lain untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai serta pembayaran manfaat pensiun termasuk THR, sehingga mendorong pertumbuhan konsumsi pemerintah dalam PDB.**

**Realisasi Belanja Pemerintah Pusat  
s.d 31 Maret 2024 (dalam triliun Rupiah)**

<b>Belanja Pemerintah Pusat</b>	<b>APBN</b>	<b>Realisasi sd Maret</b>	<b>% thd APBN</b>	<b>Growth (%)</b>
<b>Belanja K/L</b>	<b>1.090,83</b>	<b>222,25</b>	<b>20,37</b>	<b>33,14</b>
Belanja Pegawai	285,80	70,69	24,73	42,77
Belanja Barang	405,26	80,60	19,89	38,86
Belanja Modal	247,47	27,64	11,17	17,76
Bantuan Sosial	152,30	43,33	28,45	20,65
<b>Belanja Non-K/L</b>	<b>1.376,70</b>	<b>205,37</b>	<b>14,92</b>	<b>13,89</b>
a.l Belanja Pegawai	198,63	59,65	30,03	43,05
Subsidi	285,97	30,11	10,53	(19,79)
Belanja Lain-Lain	388,04	1,36	0,35	95,44
<b>Total</b>	<b>2.467,53</b>	<b>427,62</b>	<b>17,33</b>	<b>23,14</b>

penyaluran bantuan sembako, penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP), pembayaran PBI JKN, pembangunan infrastruktur konektivitas, kegiatan pelaksanaan Pemilu 2024, pembayaran THR ASN/TNI/POLRI, serta pemeliharaan barang milik negara.

Belanja Pegawai terealisasi Rp70,69 triliun atau 24,73 persen dari pagu. Realisasi Belanja Pegawai tersebut digunakan untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN/TNI/POLRI, termasuk pembayaran THR ASN/TNI/POLRI.

Belanja Barang terealisasi Rp80,60 triliun atau 19,89 persen dari pagu. Realisasi tersebut terutama dimanfaatkan untuk penyaluran dana BOS, serta pelaksanaan dan pengawasan kegiatan Pemilu 2024. Selain itu, realisasi Belanja Barang dimanfaatkan antara lain untuk: (1) penyaluran dana BOS, serta peningkatan mutu dan relevansi pendidikan oleh

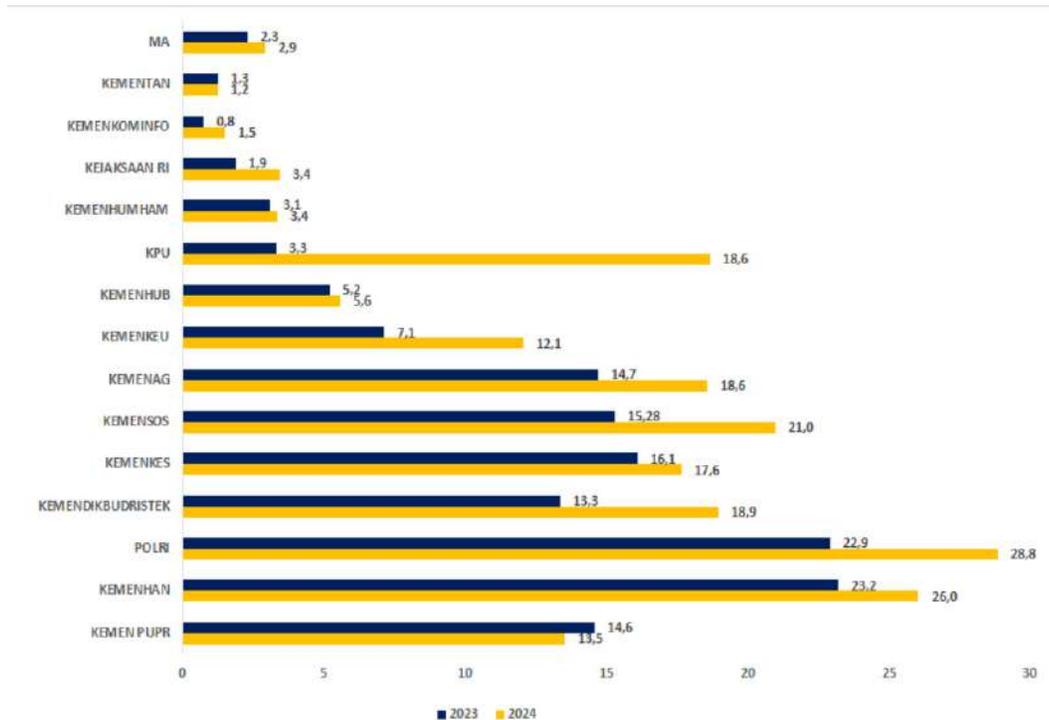
Kementerian Agama (Kemenag); (2) Pembayaran honorarium badan Adhoc, pemungutan dan penghitungan suara, pengadaan barang/jasa/logistik Pemilu 2024 oleh KPU; (3) Pelaksanaan operasi keamanan, pengadaan/dukungan logistik, dan pelayanan kesehatan oleh POLRI; (4) Penyusunan peraturan pengawasan Pemilu, pengawasan penyelenggaraan Pemilu oleh lembaga Adhoc, pengawasan pemungutan dan penghitungan suara oleh Bawaslu; dan (5) Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Matra Darat, Laut, Udara dan Umum Integratif, pengadaan dan pemeliharaan alutsista, operasi pertahanan, dan pelayanan Kesehatan oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

Realisasi Belanja Modal mencapai Rp27,64 triliun atau 11,17 persen dari pagu. Kinerja realisasi Belanja Modal dimanfaatkan antara lain untuk: (1) belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan

untuk pembangunan jalan, jembatan, dan prasarana bidang sumber daya air dan irigasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR); (2) belanja modal peralatan dan mesin untuk pengadaan sarana dan prasarana bidang hankam oleh POLRI dan Kemhan, serta sarana prasarana intelijen Kejaksaan; dan (3) realisasi belanja modal gedung dan bangunan untuk pembangunan sarana dan prasarana bidang kesehatan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan prasarana perumahan dan permukiman oleh Kemen PUPR.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial (Bansos) mencapai Rp43,33 triliun atau 28,45 persen dari pagu. Realisasi Belanja Bansos antara lain dimanfaatkan untuk: (1) penyaluran bantuan PKH bagi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM); (2) penyaluran bantuan program kartu sembako bagi 18,7 juta KPM; (3) penyaluran bantuan iuran bagi 96,7 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); (4) penyaluran bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) bagi 9,4 juta siswa dan bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bagi 642,4 ribu mahasiswa; serta (5) pelaksanaan tanggap darurat bencana oleh BNPB.

**Realisasi Belanja 15 Kementerian/Lembaga Dengan Pagu Terbesar s.d 31 Maret TA 2023–2024 (Triliun Rupiah)**





## Realisasi Belanja Subsidi dimanfaatkan untuk memperkuat daya beli masyarakat.

Dari perspektif organisasi, realisasi Belanja K/L terutama disumbangkan oleh 15 K/L dengan pagu terbesar yang mewakili 87,0 persen dari total realisasi Belanja K/L. Realisasi tersebut terutama didorong antara lain oleh realisasi pada POLRI, KPU, Kemensos, Kemenhan, Kemenag, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikudristek), dan Kemenkes.

### **BELANJA NON-K/L**

Realisasi Belanja Non-K/L mencapai Rp205,37 triliun atau 14,29 persen dari pagu. Realisasi tersebut terutama digunakan untuk pembayaran manfaat pensiun. Belanja Pegawai Non-K/L terealisasi Rp59,65 triliun atau 33,96 persen dari pagu, antara lain digunakan untuk pemenuhan kewajiban pemerintah terhadap para pensiunan ASN/TNI/POLRI, termasuk pembayaran THR pensiunan ASN/TNI/POLRI.

Realisasi Belanja Subsidi mencapai Rp30,11 triliun, atau 10,53 persen dari pagu. Realisasi tersebut terdiri atas: (a) Subsidi Energi Rp27,86 triliun, mencakup Subsidi BBM, Subsidi LPG Tabung 3 Kg, dan Subsidi Listrik; dan (b) Subsidi Nonenergi Rp2,25 triliun, terutama untuk Subsidi Bunga KUR. Realisasi pembayaran Subsidi Energi tersebut untuk penyaluran BBM bersubsidi 2,8 juta KL, LPG Tabung 3 Kg 1,3 juta MT, pelanggan listrik bersubsidi sejumlah 40,2 juta pelanggan, dan volume konsumsi listrik bersubsidi 11,2 TWh. Realisasi Subsidi Nonenergi terutama dimanfaatkan untuk Subsidi Bunga KUR kepada 937,4 ribu debitur dan plafon penyaluran KUR Rp54,3 triliun, serta penyaluran pupuk bersubsidi 1,3 juta ton.

Realisasi Belanja Lain-Lain mencapai Rp1,36 triliun atau 0,35 persen dari pagu. Realisasi tersebut dimanfaatkan terutama untuk Program Kartu Prakerja mencapai Rp839,42 miliar.

Halaman Ini Dikосongkan

**Penyaluran TKD Telah  
Terealisasi Rp184,32  
Triliun atau 21,49  
Persen dari Pagu**



# Transfer ke Daerah

**R**ealisasi Transfer ke Daerah (TKD) sampai dengan 31 Maret 2024 mencapai Rp184,32 triliun, atau 21,49 persen dari pagu. Sebagian dana TKD belum disalurkan karena masih menunggu penyampaian syarat salur dan/atau belum masuk jadwal penyaluran.

## DANA BAGI HASIL

Sampai dengan akhir Maret 2024, penyaluran DBH mencapai Rp24,12 triliun atau 16,85 persen dari pagu. Capaian tersebut disebabkan oleh kenaikan pagu DBH SDA



**Untuk penyaluran Hibah kepada Daerah menggunakan mekanisme reimbursement berdasarkan progress penyelesaian pekerjaan di daerah.**

Realisasi TKD T.A. 2023 & 2024  
Tanggal: 1 Januari – 31 Maret 2024

dalam miliar rupiah

Uraian	TA 2023			TA 2024			
	APBN	Realisasi	% thd APBN	APBN	Realisasi	% thd APBN	% YoY Nom (2023- 24)
<b>Transfer ke Daerah</b>	<b>814.718,5</b>	<b>171.340,7</b>	<b>21,03</b>	<b>857.591,7</b>	<b>184.321,7</b>	<b>21,49</b>	<b>7,58</b>
Dana Bagi Hasil	136.260,0	22.249,7	16,33	143.099,9	24.116,8	16,85	8,39
Dana Alokasi Umum	396.000,0	104.209,8	26,32	427.699,3	111.600,5	26,09	7,09
Dana Alokasi Khusus	185.797,3	31.526,9	16,97	188.101,0	31.272,2	16,63	-0,81
1. DAK Fisik	53.422,5	170,6	0,32	53.822,5	0,0	0,00	-100,00
2. DAK Nonfisik	130.297,3	31.322,6	24,04	133.764,6	31.272,2	23,38	-0,16
3. Hibah ke Daerah	2.077,5	33,7	1,62	513,9	0,0	0,00	-100,00
Dana Otonomi Khusus	17.241,3	0,0	0,00	18.271,5	0,0	0,00	
Dana Keistimewaan DIY	1.420,0	165,7	11,67	1.420,0	213,0	15,00	28,55
Dana Desa	70.000,0	13.032,2	18,62	71.000,0	16.854,4	23,74	29,33
Insentif Fiskal	8.000,0	156,4	1,96	8.000,0	264,7	3,31	69,25

Minerba 2024 24,6 persen (yoy).

### DANA ALOKASI UMUM

Realisasi penyaluran DAU pada akhir Maret 2024 mencapai Rp111,60 triliun atau 26,09 persen dari pagu. Penyaluran tersebut terutama dikontribusikan oleh peningkatan porsi DAU *Block Grant*.

### DANA TRANSFER KHUSUS

Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) belum terdapat realisasi penyaluran. Hal ini disebabkan karena saat ini pemerintah daerah dalam proses penyiapan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik, yang di antaranya tahapan

penetapan kontrak pengadaan barang dan jasa, yaitu rentang waktu penyaluran DAK Fisik tahap I paling lambat dilakukan sampai dengan bulan Juli.

Strategi percepatan penyaluran DAK Fisik telah dilakukan di antaranya melalui percepatan proses penerbitan peraturan presiden tentang petunjuk teknis, mendorong pemda untuk percepatan proses pengadaan barang dan jasa, sosialisasi dan bimbingan teknis dalam rangka: (1) meningkatkan pemahaman regulasi pengelolaan DAK Fisik terutama terkait tata kelola penyaluran DAK Fisik, (2) meningkatkan kualitas dan integritas SDM pengelola keuangan daerah termasuk APIP



Daerah, dan (3) penguatan koordinasi antarlevel pemerintahan dan internal pemerintah daerah agar pemanfaatan DAK Fisik lebih optimal.

Sementara itu, DAK Nonfisik telah disalurkan Rp31,27 triliun atau 23,38 persen dari pagu. Capaian tersebut terutama karena di Januari telah dilakukan penyaluran Tahap I Dana BOSP yang terdiri atas Dana BOS, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP Kesetaraan. Selain itu, terdapat perbaikan tata kelola penyampaian data BOS di daerah dan di Kemendikbudristek. Untuk Februari s.d Maret telah dilakukan penyaluran beberapa jenis DAK Nonfisik antara lain Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak, Dana Bantuan Operasional Kesehatan, dan Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKM) untuk Tahap I sesuai ketentuan.

Sedangkan untuk penyaluran Hibah kepada Daerah menggunakan mekanisme *reimbursement* berdasarkan progress penyelesaian pekerjaan di daerah. Realisasi di awal tahun jarang terjadi kecuali terdapat tagihan tahun sebelumnya yang dibayarkan pada 2024.

#### **DANA OTONOMI KHUSUS DAN DANA KEISTIMEWAAN D.I. YOGYAKARTA**

Sampai dengan akhir Maret 2024, belum terdapat realisasi penyaluran Dana Otonomi Khusus dikarenakan belum ada daerah penerima yang menyampaikan dokumen syarat salur kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).

## **Terjadi peningkatan kepatuhan penyampaian syarat penyaluran oleh pemerintah daerah dan desa sehingga kinerja penyaluran Dana Desa mengalami perbaikan.**

Sesuai PMK Nomor 76/PMK.07/2022, dokumen syarat salur Dana Otonomi Khusus Tahap I disampaikan paling lambat akhir April 2024.

Sementara itu, Dana Keistimewaan TA 2024 Tahap I telah disalurkan Rp213 miliar atau 15 persen dari pagu. Sesuai amanat PMK 163 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan DIY, penyaluran Dana Keistimewaan memperhitungkan sisa dana tahun anggaran sebelumnya Rp23,84 miliar, sehingga nilai bersih transfer Tahap I dari RKUN ke RKUD Rp189,16 miliar.

#### **DANA DESA**

Sampai dengan periode ini, Dana Desa telah disalurkan Rp16,85 triliun atau 23,74 persen dari pagu. Capaian tersebut dipengaruhi oleh *redesign* penyaluran Dana Desa melalui pemisahan penyaluran Dana Desa *earmarked* (penanganan kemiskinan

ekstrem melalui BLT Desa, program ketahanan pangan dan hewani, dan program pencegahan dan penurunan *stunting*) dan *non-earmarked* berdasarkan kinerja pelaksanaan, dan pemberian *reward* berupa persentase penyaluran Dana Desa *non-earmarked* tahap I lebih besar untuk Desa berstatus Mandiri. Selain itu, terjadi peningkatan kepatuhan penyampaian syarat penyaluran oleh pemerintah daerah dan desa sehingga kinerja penyaluran Dana Desa mengalami perbaikan.

### **INSENTIF FISKAL**

Sampai dengan akhir Maret 2024 telah disalurkan Rp264,7 miliar atau 3,31 persen dari pagu. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar 69,25 persen (*yoy*) dibanding periode yang sama tahun lalu. Perbaikan capaian penyaluran Insentif Fiskal (IF) pada tahun ini salah satunya disebabkan

oleh sosialisasi dan koordinasi yang terus dibangun kepada pemda penerima alokasi untuk meningkatkan pemahaman mengenai ketentuan penggunaan dan penyaluran IF serta mempercepat penyampaian dokumen-dokumen yang menjadi syarat salur IF.

Jumlah realisasi penyaluran IF di atas merupakan penyaluran tahap I (50 persen pagu alokasi) dari IF TA 2024 atas kinerja tahun sebelumnya. Penyaluran tersebut dilakukan setelah pemda menyampaikan syarat salur berupa Perda APBD 2024, rencana penggunaan IF 2024, dan/atau laporan realisasi penyerapan IF 2023 bagi daerah yang memperoleh alokasi di tahun 2023.

Halaman Ini Dikosongkan



Pembiayaan Utang  
Dalam Batas Aman  
dan *Manageable*  
Mendukung  
Konsolidasi  
untuk Menjaga  
Kesinambungan  
Fiskal

Foto: Kemenkeu - Resha Aditya

# Pembiayaan Utang

**D**efisit APBN 2024 ditargetkan sebesar 2,29 persen dari PDB, dengan realisasi hingga akhir Maret 2024 terkendali dalam batas aman (*prudent*) sebesar positif 0,04 persen dari PDB (surplus). Penetapan defisit APBN tak lepas dari keputusan pemerintah menerapkan kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan ekspansif dilakukan dengan terukur, terarah, dan konsisten untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan melindungi daya beli masyarakat sehingga kondisi fiskal terjaga tetap sehat dan berkelanjutan.

Pembiayaan utang menjadi salah satu instrumen untuk menutupi defisit tersebut, dan dijalankan secara hati-hati, fleksibel, oportunistik dan akuntabel. Realisasi pembiayaan utang sampai

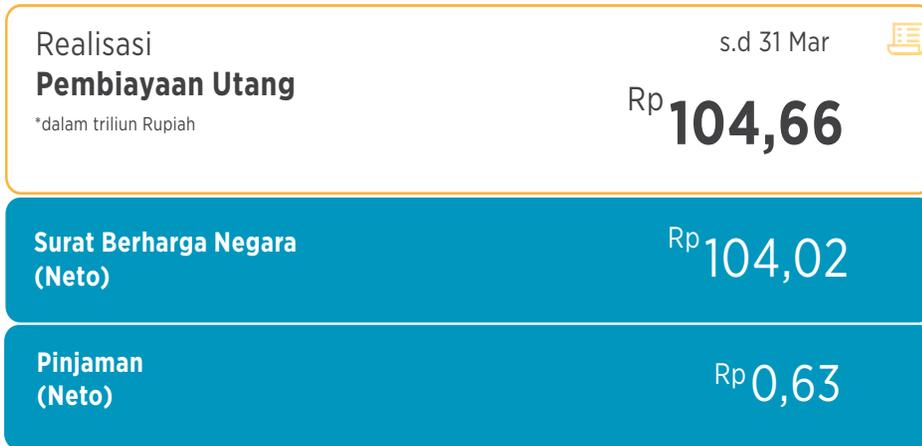
dengan akhir Maret 2024 mencapai Rp104,66 triliun atau 16,1 persen dari target APBN 2024, terdiri atas realisasi SBN (Neto) Rp104,02 triliun dan realisasi Pinjaman (Neto) Rp0,63 triliun.

Penerbitan SBN di pasar domestik menjadi prioritas dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN untuk mengendalikan risiko. Guna mencapai efisiensi biaya utang, Pemerintah berupaya mendorong terciptanya pasar SBN yang dalam, aktif, dan likuid di antaranya melalui lelang SBN domestik secara reguler dengan mekanisme pasar di mana investor menyampaikan penawaran (*bid*) kompetitif melalui Dealer Utama. Selama Maret 2024, telah dilaksanakan 4 kali lelang SBN yang terdiri dari 2 lelang SUN dan 2 lelang SBSN. Kinerja lelang SBN pada bulan

# Pembiayaan Utang

**\*Data per 31 Maret 2024**

**f** Pembiayaan utang dalam batas aman dan *manageable* mendukung konsolidasi untuk menjaga kesinambungan fiskal



Pengadaan utang melalui SBN sepanjang bulan Maret dilakukan melalui 4x lelang reguler setiap hari Selasa. Di samping itu, sebagai bagian dari pengelolaan portofolio, pemerintah juga melakukan lelang pembelian kembali SUN dengan cara penukaran (*debt switch*) pada 21 Maret 2024.



## Periode Triwulan I 2024



Rata-rata penawaran yang masuk tiap lelang

Rp **39,94** triliun



Rata-rata nominal dimenangkan tiap lelang

Rp **17,76** triliun

**f** Pembiayaan utang menjadi salah satu instrumen untuk menutupi defisit tersebut, dan dijalankan secara hati-hati, fleksibel, oportunistik dan akuntabel.

Maret mencatatkan *bid to cover ratio* sebesar 1,96x. Rata-rata penawaran yang masuk sepanjang triwulan pertama tahun 2024 Rp39,94 triliun/lelang dan rata-rata nominal yang dimenangkan sebesar Rp17,76 triliun/lelang.

Selanjutnya, sebagai bagian dari pengelolaan portofolio pembiayaan, pemerintah juga telah melakukan lelang pembelian kembali SUN dengan cara penukaran (*debt switch*) dengan mekanisme Many to Many pada tanggal 21 Maret 2024. Lelang dilakukan dengan menggunakan fasilitas MOFIDS (*Ministry of Finance Dealing System*) *trading platform* dengan nominal penawaran yang disampaikan oleh peserta lelang Rp4,43 triliun. Selain itu, di Maret 2024, pemerintah juga telah melakukan *early redemption* SBN ritel seri SBR012T2 Rp177,28 miliar yang diajukan oleh 1.406 investor. *Early redemption* ini merupakan fasilitas yang diberikan kepada investor SBR012T2 untuk mendapatkan sebagian pelunasan pokok investasinya sebelum memasuki masa jatuh tempo.

Sementara itu, ditinjau dari posisi utang pemerintah yang *outstanding*, jumlah utang pemerintah per akhir Maret 2024 adalah sebesar Rp8.262,10 triliun. Selaras dengan kebijakan umum pembiayaan utang untuk mengoptimalkan sumber pembiayaan dalam negeri dan memanfaatkan utang luar negeri sebagai pelengkap, mayoritas utang pemerintah berasal dari dalam negeri dengan proporsi 71,52 persen. Sementara berdasarkan instrumen, komposisi utang pemerintah sebagian besar berupa SBN yang mencapai 88,05 persen.

Pasar SBN yang efisien akan meningkatkan daya tahan sistem keuangan Indonesia terhadap guncangan ekonomi dan pasar keuangan. Dengan aktivitas



## Dengan aktivitas pembiayaan utang melalui penerbitan SBN, pemerintah turut mendukung pengembangan dan pendalaman pasar keuangan domestik

pembiayaan utang melalui penerbitan SBN, pemerintah turut mendukung pengembangan dan pendalaman pasar keuangan domestik. SBN turut menyediakan referensi untuk menentukan harga instrumen pasar keuangan lainnya dan digunakan oleh para pelaku pasar untuk mengelola risiko suku bunga.

Per akhir Maret 2024, lembaga keuangan memegang sekitar 43,4 persen kepemilikan SBN domestik, terdiri dari perbankan 24,8 persen dan perusahaan asuransi dan dana pensiun sebesar 18,6 persen. Bagi lembaga keuangan, SBN berperan penting dalam memenuhi kebutuhan investasi dan pengelolaan likuiditas, serta menjadi salah satu instrumen mitigasi risiko. Kepemilikan SBN domestik oleh Bank Indonesia sekitar 21,3 persen yang antara lain digunakan sebagai instrumen pengelolaan moneter. Sementara, asing hanya memiliki SBN domestik sekitar 14,2 persen termasuk kepemilikan oleh pemerintah dan bank sentral asing. Sejalan dengan upaya

# Komposisi Utang

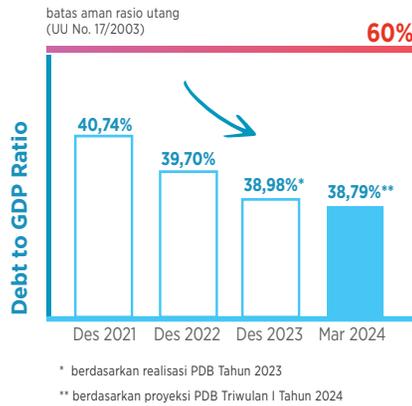
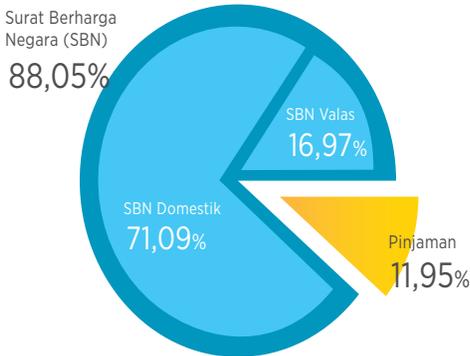
**\*Data per 31 Maret 2024**

**P**emerintah mengelola utang secara cermat dan terukur untuk mencapai portofolio utang yang optimal dan mendukung pengembangan pasar keuangan domestik

## Posisi Utang

Rp **8.262,10**  
\*dalam triliun Rupiah

**Debt to GDP**  
**38,79%**



**Surat Berharga Negara**  
Rp **7.274,95**  
\*dalam triliun Rupiah

- Domestik** Rp 5.947,95
  - Surat Utang Negara Rp 4.797,16
  - Surat Berharga Syariah Negara Rp 1.150,79
- Valas** Rp 1.388,92
  - Surat Utang Negara Rp 1.044,37
  - Surat Berharga Syariah Negara Rp 344,55

**Pinjaman**  
Rp **987,15**  
\*dalam triliun Rupiah

- Pinjaman DN\*** Rp 35,51
- Pinjaman LN\*** Rp 951,64
  - Bilateral Rp 264,73
  - Multilateral Rp 584,69
  - Commercial Banks Rp 102,22
  - Suppliers Rp -

pemerintah memperluas basis investor, inklusi keuangan dan peningkatan literasi keuangan masyarakat dari *savings society* menjadi *investment society*, kepemilikan investor individu di SBN domestik terus mengalami peningkatan sejak 2019 yang hanya di bawah 3 persen menjadi 7,95 persen per akhir Maret 2024. Sisa kepemilikan SBN domestik dipegang oleh institusi domestik lainnya untuk memenuhi kebutuhan investasi dan pengelolaan keuangan institusi bersangkutan.

Selanjutnya, guna meningkatkan efisiensi pengelolaan utang dalam jangka panjang, pemerintah terus berupaya mewujudkan pasar SBN domestik yang dalam, aktif, dan likuid. Salah satu strateginya adalah melalui pengembangan berbagai instrumen SBN, termasuk pula pengembangan SBN tematik berbasis lingkungan (*Green Sukuk*) dan SDGs (*SDG Bond* dan *Blue Bond*). Peranan transformasi digital dalam proses penerbitan dan penjualan SBN yang didukung dengan sistem online juga tak kalah penting, mampu membuat pengadaan utang melalui SBN menjadi semakin efektif dan efisien, serta kredibel.

Pengelolaan portofolio utang berperan besar dalam menjaga kesinambungan fiskal secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemerintah konsisten mengelola utang secara cermat dan terukur dengan menjaga risiko suku bunga, mata uang, likuiditas, dan jatuh tempo yang optimal. Rasio utang per akhir Maret 2024 yang sebesar 38,79 persen terhadap PDB, tetap konsisten terjaga di bawah batas aman 60 persen PDB sesuai UU No. 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara serta lebih baik dari yang telah ditetapkan melalui Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah tahun 2024–2027 di kisaran 40%. Selain itu, pemerintah mengutamakan pengadaan utang dengan jangka waktu menengah-panjang dan melakukan pengelolaan portofolio utang secara aktif. Per akhir Maret 2024, profil jatuh tempo utang pemerintah terhitung cukup aman dengan rata-rata tertimbang jatuh tempo (*average time maturity/ATM*) di kisaran 8 tahun.

Pengelolaan utang pemerintah yang disiplin turut menopang hasil asesmen lembaga pemeringkat kredit (S&P, Fitch, Moody's, R&I, dan JCR) yang hingga saat ini tetap mempertahankan *sovereign rating* Indonesia pada level *investment grade* di tengah dinamika perekonomian global dan volatilitas pasar keuangan. Pada 16 April 2024, lembaga pemeringkat Moody's kembali mempertahankan *Sovereign Credit Rating* Indonesia pada peringkat Baa2, satu tingkat di atas *investment grade*, dengan *outlook* stabil. Moody's memandang afirmasi ini sejalan dengan hasil asesmen bahwa ketahanan ekonomi Indonesia tetap terjaga didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil.

# Calendar Events 2024

Penyusunan Kapasitas Fiskal  
(Resource Envelope)  
Penawaran SBN Ritel ORIO25  
Lomba Debat APBN - Mahasiswa  
DJA Menyapa

Penyampaian Pagu  
Indikatif RAPBN 2025  
Penawaran SBN Ritel ST012  
Lomba Debat APBN  
- Mahasiswa  
Lomba Konten APBN - SMP

Pembicaraan Pendahuluan  
RAPBNTA 2025  
Penyampaian Pagu  
Anggaran RAPBN 2025  
Penawaran SBN Ritel SBR013  
Penawaran SBN  
Ritel SWR005

01

03

05

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

02

04

06

Penawaran SBN Ritel ORIO25  
DJA Menyapa

Penyusunan Kapasitas Fiskal  
Penyampaian Pagu  
Indikatif RAPBN 2025  
Penawaran SBN Ritel SRO20  
Lomba Debat APBN - Mahasiswa  
Budget Goes to Campus

Penyampaian Dokumen  
KEM PPFTA 2025  
Penawaran SBN Ritel ST012  
Penawaran SBN Ritel SBR013  
Lomba Debat APBN - Mahasiswa  
Lomba Konten APBN - SMP



Pidato Presiden dalam rangka  
Penyampaian RUU APBN  
2025 dan Nota Keuangan  
Penawaran SBN Ritel SR021  
Lomba Cerdas Cermat APBN - SMA  
Lomba Video Mengajar  
APBN - Guru SMA/SMP

Pembahasan RUU APBN  
2025 dan Nota Keuangan  
Penetapan Peraturan Presiden  
tentang Rincian APBN TA 2025  
Penawaran SBN Ritel ORIO26  
Lomba Video Mengajar  
APBN - Guru SMA/SMP  
Budget Goes to Campus  
HORI 78 Tahun 2024

DJA Menyapa  
Penawaran SBN Ritel ST013



Penyampaian Pagu  
Anggaran RAPBN 2025  
Penawaran SBN Ritel SBR013  
Penawaran SBN Ritel SWR005  
Lomba Cerdas Cermat  
APBN - SMA  
Lomba Video Mengajar  
APBN - Guru SMA/SMP  
Budget Goes to Campus

Pembahasan RUU APBN  
2025 dan Nota Keuangan  
Penawaran SBN Ritel SR021  
Penawaran SBN Ritel ORIO26  
Lomba Cerdas Cermat APBN - SMA  
Lomba Video Mengajar  
APBN - Guru SMA/SMP  
DJA Menyapa

Penetapan DIPA Tahun 2025  
Penawaran SBN Ritel ST013

# Laporan Khusus



# Lapor SPT Tahunan, Bukti Kecintaan pada Negara

**M**edio Maret 2024, Direktorat Jenderal Pajak telah membukukan penerimaan pajak Rp342,88 triliun atau 17,24 persen dari target yang diamanatkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 – yang mencapai Rp1.989 triliun. Hal ini perlu kita sambut dengan optimisme yang tinggi, dengan harapan target penerimaan pajak dapat diamankan selama empat tahun berturut-turut.

Pajak merupakan kewajiban warga negara, yang tertulis secara eksplisit di Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945, yakni di Pasal 23A. Hal ini menunjukkan kedudukan pajak yang sangat istimewa dalam kehidupan bernegara. Pajak merupakan tulang punggung sumber anggaran negara. Pajak juga merupakan wujud partisipasi warga negara dalam pembangunan bangsanya. Oleh karena itu, pajak bukan sekadar pemenuhan

kewajiban saja, melainkan di dalamnya juga terkandung pelaksanaan hak warga negara. Lain kata, pajak juga merupakan wujud gotong-royong warga dalam membangun negara.

Maret juga identik dengan bulan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh), terutama bagi wajib pajak orang pribadi. Batas waktu pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi adalah 31 Maret 2024, sedangkan bagi wajib pajak badan adalah 30 April 2024.

Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, beserta jajaran Kabinet Indonesia Maju telah menunjukkan keteladanan, dengan melaporkan SPT Tahunan, di Istana Negara, Jakarta, pada 22 Maret 2024. Didampingi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo, beserta jajaran, kepala negara dan jajaran kabinet bersama-



sama melaporkan SPT Tahunan. Beberapa hari kemudian, Ketua Majelis Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo juga telah melaporkan SPT Tahunan. Hal ini merupakan sinyal kuat bahwa para pemimpin negara ini, hadir sebagai panutan dan memberikan contoh nyata, bahwa hak dan kewajiban perpajakan setiap warga negara adalah setara.

Selain kesukarelaan para wajib pajak, hal ini juga berkat kerja keras jajaran Kementerian Keuangan dan DJP. Tercatat, selama Januari hingga akhir Maret 2024, telah digelar 3.093 layanan pojok pajak atau layanan di luar kantor, yang diselenggarakan oleh seluruh kantor pajak di Indonesia. Layanan pojok pajak ini tersedia di kantor kelurahan, kecamatan, pemerintah daerah, mal, dan pusat keramaian lainnya. Ditambah lagi, pada tanggal 30–31 Maret 2024, saat hari libur, semua kantor pajak tetap membuka layanan.

Selain para petugas pajak, Relawan Pajak untuk Negeri (Renjani) juga perlu

diapresiasi. Para relawan ini dengan gigih turut memberikan panduan dan asistensi dalam pengisian SPT Tahunan, serta membantu para petugas pajak. Sri Mulyani memberikan penghargaan kepada para Renjani di akun Instagram beliau. “Kalian mewakili generasi muda Indonesia yang peduli akan masa depan bangsa Indonesia,” tulisnya dalam takarir konten Instagram @smindrawati.

Kerja keras fiskus serta Renjani, dukungan solid jajaran Kementerian Keuangan dan DJP, juga partisipasi aktif wajib pajak ini berbuah manis. Berdasarkan data pada 31 Maret 2024 pukul 23.59 WIB, sebanyak 12.987.904 wajib pajak telah melaporkan SPT Tahunan. Sejumlah pelaporan SPT Tahunan tersebut terdiri atas 12.636.477 wajib pajak orang pribadi, dan 351.427 wajib pajak badan. Angka tersebut tumbuh 7,32 persen dari tahun lalu, yang sebesar 12.102.068 laporan SPT Tahunan, dengan perincian wajib pajak orang pribadi tumbuh 7,38 persen dan wajib pajak badan tumbuh 5,15

persen. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan formal meningkat.

April 2024 belum usai. Layanan penerimaan pelaporan SPT Tahunan untuk wajib pajak badan masih berlangsung. Tentu kita berharap angka pelaporan SPT Tahunan kian bertambah -khususnya dari wajib pajak badan. Mari, kita jalankan peran gotong-royong pajak ini, dengan tertib melaporkan SPT Tahunan kita. Pajak kuat, APBN sehat, Indonesia sejahtera.

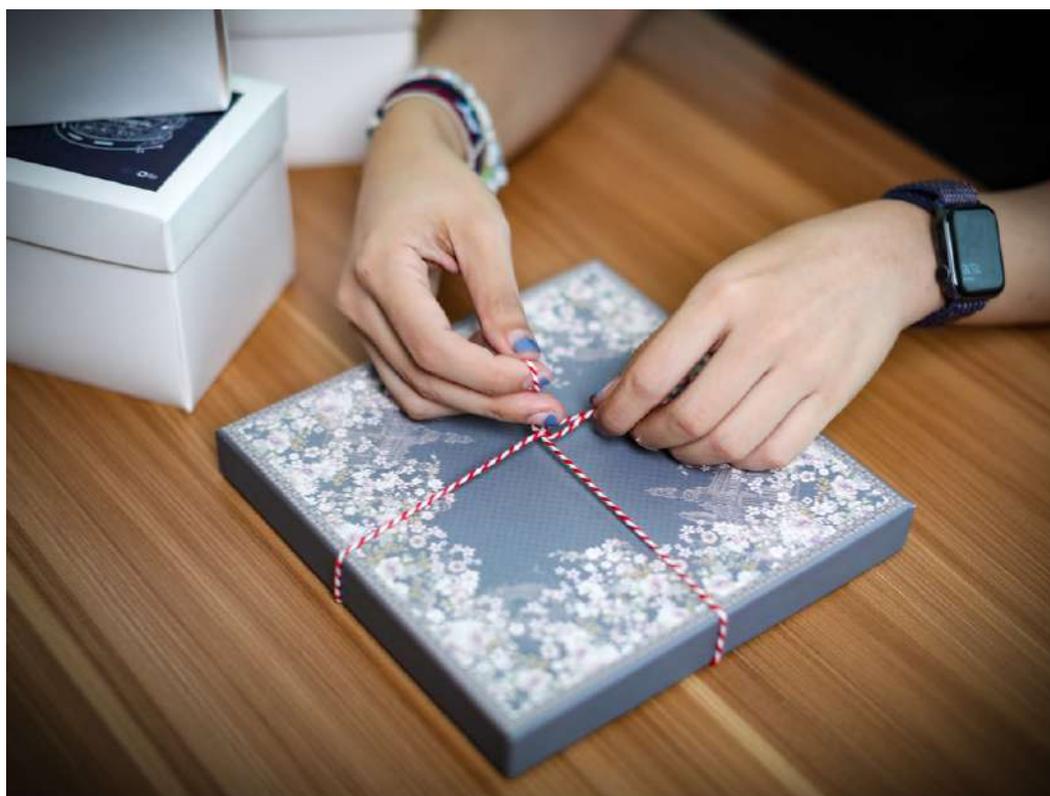
# Bingkisan Lebaran dalam Bingkai Perpajakan

**M**omentum lebaran selalu ditunggu-tunggu umat muslim di Indonesia. Setiap menjelang lebaran, umumnya perusahaan memberikan bingkisan lebaran kepada karyawan dan juga konsumennya. Bagaimana aspek perpajakannya? Mari kita simak bersama.

Setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023, diatur lebih lanjut terkait perlakuan perpajakan yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan (PPH). Di dalam Lampiran PMK Nomor 66 Tahun 2023 huruf A nomor 1, diatur bahwa bingkisan dari pemberi kerja antara lain berbentuk bahan makanan, bahan minuman, makanan dan/atau minuman dalam rangka hari besar keagamaan meliputi Hari Raya Idulfitri, Hari Raya Natal, Hari Suci Nyepi, Hari Raya Waisak, atau Tahun Baru Imlek dikecualikan dari objek PPH. Namun,

terdapat batasan atas pengecualian tersebut yaitu harus diterima oleh seluruh pegawai. Apabila syarat ini tidak terpenuhi, misalnya hanya diterima oleh beberapa karyawan tertentu, maka dapat berpotensi menjadi objek PPH.

Sebagai contoh, sebuah perusahaan memberikan bingkisan lebaran hanya kepada dewan direksinya saja. Dalam kasus seperti ini, bingkisan lebaran kepada dewan direksi tersebut menjadi objek PPH. Sedangkan apabila bingkisan tersebut diberikan kepada seluruh karyawan maka bagi penerima dikecualikan dari objek PPH. Nilai bingkisan yang dikecualikan dari objek PPH tersebut tetap dilaporkan dalam SPT Tahunan pada kolom "Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak" untuk jenis penghasilan nomor 6 huruf b yaitu "Penggantian atau Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diberikan dalam



Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan yang Dikecualikan dari Objek PPh”.

### **PENGURANG PENGHASILAN BRUTO**

Dari sisi perusahaan yang memberikan bingkisan, pemberian bingkisan lebaran tersebut dapat dibebankan secara fiskal sebagai pengurang penghasilan bruto. Hal ini berlaku sejak UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan terbit, yang menghapus Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh sehingga penggantian/imbalan sehubungan dengan pekerjaan/jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan dapat menjadi pengurang penghasilan bruto wajib pajak.

Dalam hal bingkisan lebaran tersebut diberikan kepada konsumen, pelanggan, atau klien dalam hubungannya dengan kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan perusahaan, maka bingkisan tersebut dapat termasuk dalam biaya promosi

dan penjualan. Biaya ini termasuk dalam biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022.

Pemberian bingkisan kepada pelanggan yang termasuk dalam biaya promosi dan penjualan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto tersebut harus memperhatikan syarat: 1) untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan penjualan; 2) dikeluarkan secara wajar; dan 3) menurut adat kebiasaan pedagang yang baik. Ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Adapun menurut sebuah Surat Edaran Dirjen Pajak di tahun 1986 yang mengatur tentang Biaya *Entertainment* dan Sejenisnya, untuk dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, perusahaan harus dapat membuktikan biaya tersebut benar-benar dikeluarkan (aspek formal) dan benar-benar ada hubungannya dengan kegiatan

perusahaan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan perusahaan (aspek material).

Biaya promosi yang dapat dibiayakan secara fiskal adalah biaya yang dibuatkan daftar nominatif dan dilaporkan pada SPT Tahunan PPh Badan sebagai lampiran. Pengisian daftar nominatif ini harus sesuai ketentuan yaitu berisi: nomor urut; tanggal *entertainment* dan sejenisnya yang telah diberikan; nama tempat, alamat, jenis, serta jumlah rupiah *entertainment* dan sejenisnya yang telah diberikan; dan relasi usaha yang diberikan *entertainment* dan sejenisnya sesuai dengan nomor urut tersebut di atas berisi nama, posisi, nama perusahaan, dan jenis usaha.

Apabila wajib pajak mencantumkan biaya promosi tetapi tidak dibuatkan daftar nominatif atau pengisian daftar nominatif tidak sesuai ketentuan, maka atas biaya promosi tersebut tidak dapat dibiayakan. Hal ini perlu menjadi perhatian perusahaan agar tidak terjadi kesalahan penerapan di lapangan.

# Gerebek Clandestine Lab Semarang, Bea Cukai dan Bareskrim POLRI Sita Sabu dan MDMA

**D**irektorat Interdiksi Narkotika Bea Cukai, bersama Bea Cukai Soekarno Hatta, dan Kanwil Bea Cukai Jateng DIY, bersinergi dengan Dittipidnarkoba Bareskrim Polri dan Ditresnarkoba Polda Jateng menggerebek laboratorium narkotika ilegal (*clandestine lab*), pada Rabu (03/04). Dari *clandestine lab* yang berlokasi di Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang tersebut, petugas gabungan menyita 2.000 ml narkotika jenis sabu dan 2.000 saset *happy water* (MDMA) siap edar milik jaringan narkotika Malaysia-Indonesia (Semarang).

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heryanto, pada Kamis (04/04) mengungkapkan kronologi penindakan narkotika tersebut. “Pada awal Januari 2024, Direktorat Interdiksi Narkotika Bea Cukai dan Bea Cukai Soekarno Hatta menghimpun informasi intelijen akan adanya paket mencurigakan

berisi narkotika golongan I jenis MDMA dari Hongkong dan Tiongkok. Informasi tersebut pun kami teruskan ke Dittipidnarkoba Bareskrim Polri,” ujarnya.

Menindaklanjuti informasi itu, tim gabungan Bea Cukai dan Polri melaksanakan *mapping*, *profiling*, dan observasi di sekitar wilayah Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang Jawa Tengah selama satu setengah bulan. “Kami mencurigai adanya aktivitas yang terindikasi produksi narkotika di sebuah rumah di wilayah tersebut yang dijadikan *clandestine lab*. Akhirnya pada tanggal 03 April 2024, tim gabungan menggerebek rumah itu,” lanjut Nirwala.

Selain menyita barang bukti sabu dan MDMA siap edar, dari penggerebekan tersebut, petugas juga menyita bahan baku MDMA yang akan menghasilkan 1.500 saset MDMA siap edar dan menangkap dua orang tersangka berinisial PR dan F. Kedua



tersangka mengaku memproduksi narkotika jenis sabu dan MDMA atas perintah KA, yang saat ini berstatus DPO. Hasil produksi narkotika jenis MDMA tersebut diketahui akan dipasarkan di tempat-tempat hiburan di wilayah seputaran Pulau Jawa, Bali, Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatra.

Nirwala mengatakan bahwa saat ini seluruh barang bukti dan tersangka telah diamankan oleh Polri untuk proses penyidikan lebih lanjut. Pelaku melanggar pasal 114 ayat 2 j.o. pasal 132 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35/2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda minimal senilai Rp1 miliar dan maksimal

Rp10 miliar ditambah sepertiga.

Ia juga menegaskan komitmen Bea Cukai dalam pemberantasan narkotika. "Bea Cukai akan terus menjalankan fungsinya sebagai *community protector* dengan menekan peredaran gelap narkotika bersama instansi penegak hukum lainnya. Sinergi Bea Cukai dan Polri menjadi bukti komitmen kami dalam melindungi masyarakat Indonesia dari ancaman narkotika," pungkas Nirwala.

# Sinergi Bea Cukai dan Bareskrim POLRI Kembali Bongkar Pabrik Ekstasi di Sunter

**B**ea Cukai bersinergi dengan Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipid) Bareskrim Polri kembali mengeledah sebuah laboratorium narkotika ilegal (*clandestine lab*) pada Kamis (04/04). Dari penggeledahan yang dilakukan di sebuah perumahan di wilayah Sunter, Jakarta Utara petugas gabungan mengamankan pil ekstasi sebanyak 7.800 butir, berbagai peralatan dan mesin cetak yang digunakan untuk membuat ekstasi, serta meringkus 4 orang tersangka.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa, Nirwala Dwi Heryanto, mengungkapkan kronologi penindakan tersebut. “Pada awal Januari 2024, Dittipidnarkoba Bareskrim Polri mendapatkan informasi terkait adanya paket dari luar negeri yang diduga berisi bahan baku pembuatan ekstasi.”

Berdasarkan informasi tersebut, Dittipidnarkoba Bareskrim Polri

bersama dengan Direktorat Interdiksi Narkotika dan Bea Cukai Soekarno Hatta memantau tujuan alamat pengiriman paket yang mengarah ke wilayah Sunter, Jakarta Utara. “Setelah penyelidikan yang berlangsung selama empat bulan, petugas gabungan memastikan bahwa lokasi tersebut dijadikan sebagai laboratorium ilegal. Pada 4 April 2024, petugas gabungan mengeledah lokasi tersebut dan menangkap para tersangka.”

Nirwala juga mengungkapkan modus yang digunakan para pelaku dalam kegiatan produksi ekstasi tersebut, “Modusnya adalah dengan mengimpor bahan baku yang tidak masuk dalam daftar prekursor narkotika dari Tiongkok. Selanjutnya bahan baku tersebut diproses secara kimia sampai menjadi bahan mephedron dan selanjutnya dicetak menjadi ekstasi.” Proses tersebut dipandu oleh tersangka berinisial D yang saat ini

masih terus dikejar oleh petugas. Selain itu, petugas juga masih memburu FP yang menjadi otak utama dari kegiatan produksi narkoba jenis ekstasi ini.

Selain mengamankan narkoba jenis ekstasi, petugas gabungan juga menyita alat cetak ekstasi, bahan baku yang sudah siap cetak, bahan baku, bahan adonan setengah jadi, peralatan serta mesin cetak pembuatan narkoba jenis ekstasi berkapasitas produksi 3.000 butir/jam. Petugas gabungan juga mengamankan empat orang tersangka berisial A ALS D (29), R (58), C (34), dan G (28).

Nirwala mengatakan bahwa saat ini seluruh barang bukti dan tersangka telah diamankan oleh Polri untuk proses penyidikan lebih lanjut. Pelaku melanggar pasal 114 ayat 2 j.o. pasal 132 ayat 2 dan pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35/2009 tentang Narkoba, dengan ancaman hukuman pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun, serta pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambah sepertiga sebesar Rp13.000.000.000,00.

Ia juga menegaskan komitmen Bea Cukai dalam pemberantasan narkoba. "Bea Cukai akan terus menjalankan fungsinya sebagai *community protector* dengan menekan peredaran gelap narkoba bersama Polri. Sinergi Bea Cukai dan Polri menjadi bukti komitmen kami dalam melindungi masyarakat Indonesia dari ancaman narkoba," pungkas Nirwala.

# Perpanjang MOU, Bea Cukai dan POLRI Lanjutkan Sinergi Pengawasan untuk Tiga Tahun ke Depan

**B**ea Cukai dan Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam) POLRI tanda tangani Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Understanding/ MoU*) tentang Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Baharkam POLRI pada 26 Maret 2024. Perjanjian kerja sama ini berlaku selama tiga tahun sejak ditandatangani dan merupakan perpanjangan pertama dari Perjanjian Kerja Sama Bea Cukai – Baharkam POLRI pada 24 Agustus 2020 lalu.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Encep Dudi Ginanjar, pada Selasa (02/04) mengatakan MoU ini diharapkan dapat meningkatkan keamanan warga negara dan keamanan keuangan negara. “Ini merupakan langkah awal pembentukan payung hukum atas koordinasi yang dilaksanakan selama ini. MoU ini kami harapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi

kedua pihak, serta meningkatkan keamanan warga negara dan keamanan keuangan negara atas langkah preventif yang dilaksanakan bersama secara sinergi dan proporsional,” ujarnya.

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi pertukaran data dan/atau informasi, kegiatan patroli dan latihan patroli bersama antara Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Korpolairud) dengan Bea Cukai yang melibatkan personel, sarana dan/atau prasarana, pelibatan dan pembinaan Unit K-9 yang dimiliki Bea Cukai dan POLRI, serta bantuan pengerahan sarana patroli atau personel dalam keadaan mendesak.

“Kedua pihak juga dapat bekerja sama di bidang pertukaran dan pemanfaatan data dan informasi, pengamanan dan pengawalan, pembinaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil terluar, giat patroli bersama, latihan patroli



bersama, dan penegakan hukum. Untuk kegiatan sosialisasi, MoU ini mengatur pelaksanaannya yang dapat dilaksanakan secara bersama atau mandiri, baik di tingkat pusat maupun daerah. Terakhir, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan perjanjian ini dilaksanakan minimal sekali dalam setahun,” imbuhnya.

Disebutkan Encep, kolaborasi antara Bea Cukai dan Baharkam Polri selama ini telah membuahkan hasil positif. Misal, dua penindakan narkotika di 2022 oleh Unit K-9 Kanwil Bea Cukai Kalimantan Barat bersama Polda Kalbar dan Bea Cukai Sintete bersama Polres Singkawang, dengan barang bukti 1.747,79 gram *methamphetamine*. Di tahun yang sama, Bea Cukai Lhokseumawe bersama Kanwil Bea Cukai Aceh, Kanwilsus Bea Cukai Kepri, dan Ditpolairud Polda Aceh juga menindak 3,3 juta batang rokok ilegal tanpa pita cukai merek “NIKKEN”. Lalu di tahun 2023, terdapat penindakan 825,71 gram *methamphetamine* di Riau oleh Unit K-9 Kanwil Bea

Cukai Riau bersama Polda Riau.

“Secara umum, sepanjang 2021 hingga 2023 terdapat 199 giat sinergi dan 26 giat penindakan bersama yang telah kami laksanakan. Selain itu, terdapat pula giat koordinasi dan sinergi yang telah terlaksana, baik di tingkat pusat maupun di kantor-kantor vertikal Bea Cukai dengan kantor kepolisian daerah maupun kantor kepolisian resornya masing-masing.” rincinya.

Encep menegaskan bahwa perpanjangan perjanjian kerja sama ini menunjukkan komitmen dan keberlanjutan sinergi kedua pihak. “Kami pun berkomitmen untuk terus meningkatkan sinergi dan kolaborasi antaraparat penegak hukum dan lintas K/L. Hal ini selaras dengan tugas dan fungsi Bea Cukai, berkaitan dengan pengawasan lalu lintas barang yang keluar/masuk Indonesia dan pengamanan keuangan negara,” tutupnya.

# ASEAN *Treasury Forum* Perkuat Kolaborasi *Treasury* Antarnegara ASEAN

Pembentukan ASEAN *Treasury Forum* (ATF) menjadi salah satu topik pembahasan dalam rangkaian kegiatan ASEAN *Finance and Central Bank Deputies Working Group Meeting* (AFCDM-WG) pada Februari 2024 di Vientiane, Laos. Pembahasan ini juga merupakan tindak lanjut dari agenda *High-Level Meeting* pada ASEAN *Finance Minister and Central Bank Governors' Meeting* (AFMGM) di Jakarta pada Agustus 2023. Salah satu poin penting yang disepakati adalah bahwa Indonesia akan menjadi ATF *Chair* pada tahun 2024 dan 2025, untuk menjamin kesinambungan penyelenggaraan kegiatan ATF pada dua tahun awal. Dukungan dari negara-negara ASEAN tersebut sekaligus merupakan pengakuan atas kepemimpinan Indonesia dalam isu-isu terkait dengan *public finance management dan treasury* di regional ASEAN.

Upaya pembentukan ATF pada tahun 2024 dilanjutkan dengan

pelaksanaan kegiatan *High-Level Meeting* dan *Treasury Seminar* dalam rangkaian kegiatan ASEAN *Finance Deputies Meeting* (AFDM) dan ASEAN *Finance Ministers Meeting* (AFMM) pada bulan April 2024 di Luang Prabang, Laos, untuk memperoleh persetujuan dari para Menteri Keuangan negara-negara ASEAN, yang akan menandai secara resmi terbentuknya ATF.

Dalam rangkaian ASEAN *Finance Ministers' dan Central Bank Governors' Meeting* (AFMGM), seluruh negara ASEAN telah menyatakan persetujuan dan dukungan atas pembentukan ASEAN *Treasury Forum* (ATF) yang diinisiasi Indonesia sejak tahun 2023 lalu. Mengangkat tema "*Optimizing Government Cash Management for Sustainable Development*", ASEAN *Treasury Forum Seminar* digelar secara langsung di Luang Prabang, Laos, Rabu (03/4) dan dibuka oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti selaku *Head of Delegates* (HoD) Indonesia.



“Pemerintah harus memiliki pemantauan harian yang akurat dan perkiraan kas yang dapat diandalkan untuk mendukung pengambilan keputusan dan memastikan bahwa setiap kebijakan keuangan diambil secara efektif dan efisien,” ungkap Dirjen Perbendaharaan dalam pidato pembuka *ASEAN Treasury Forum Seminar*.

Sebagai bagian dari kebijakan pengelolaan perbendaharaan dan fiskal, pengelolaan kas harus mendukung peran *countercyclical* pada saat krisis. Sebagaimana dicatat dalam pertemuan G20 di Sao Paulo, Brasil pada bulan Februari lalu, peluang ekonomi global menuju *soft landing* sangat besar, hal ini ditunjukkan oleh pertumbuhan yang tangguh, meskipun terdapat perbedaan antar negara dan wilayah. Namun dibandingkan dengan pandemi Covid-19 sebelumnya, pertumbuhan ekonomi global ini masih berada di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi pada tahun 2000 hingga 2019.

“Pembelajaran dari pandemi adalah bahwa Pemerintah memerlukan sistem pengelolaan kas yang terintegrasi

dan saling berhubungan yang dapat memberikan informasi komprehensif mengenai pendapatan dan belanja pemerintah sepanjang tahun anggaran, sehingga pembuat kebijakan dapat memperkirakan dana jangka pendek yang tersedia dan potensi kas menganggur sementara,” jelas Dirjen Perbendaharaan menegaskan peran perbendaharaan sebagai bagian dari manajemen kebijakan fiskal.

Dipandu oleh moderator dari TV Nasional Laos, *ASEAN Treasury Forum Seminar* menghadirkan tiga narasumber sebagai pembicara yaitu Deputi Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Laos Boualouengkhin Douangsavanh, Direktur Pengelolaan Kas Negara DJPb Noor Faisal Achmad, dan Pejabat Bantuan Teknis untuk Sektor Fiskal, Departemen Urusan Fiskal, *International Monetary Fund* (IMF) Holger van Eden.

*ASEAN Treasury Forum Seminar* sebagaimana dijelaskan oleh Dirjen Perbendaharaan bertujuan untuk menyediakan *platform* bagi pembicara dan peserta yang terhormat untuk

terlibat dan berbagi perspektif dan pengalaman berharga mereka tentang bagaimana pengelolaan kas ditangani di masing-masing negara selama keadaan normal atau bahkan dalam masa krisis. Semua peserta diharapkan untuk terlibat dalam diskusi dan secara aktif berbagi pengetahuan karena wawasan dari setiap individu tentunya akan sangat berharga dalam memperkuat praktik pengelolaan kas di kawasan ASEAN.

A d a p u n seremonial *launching* sekaligus *first meeting* ATF akan dilaksanakan di Indonesia pada semester 2 tahun 2024, yang akan dihadiri oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia serta seluruh pimpinan *treasury* negara-negara ASEAN. Berdirinya ASEAN Treasury Forum tersebut, serta posisi Indonesia sebagai *Chair* sampai dengan tahun 2025, akan menjadi *milestone* penting yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam mendukung capaian visi Ditjen Perbendaharaan untuk menjadi pengelola perbendaharaan negara yang unggul di tingkat dunia.

# Refleksi Peringatan Hari Bumi: Panas Bumi sebagai Sumber Energi Baru Terbarukan untuk Kesehatan dan Kelestarian Bumi

Setiap 22 April, masyarakat dunia memperingati Hari Bumi atau *Earth Day*. Melansir laman resmi Earth Day, <https://www.earthday.org/>, Hari Bumi pertama kali diperingati pada tahun 1970 berdasarkan usulan seorang senator bernama Gaylord Nelson asal Wisconsin, Amerika Serikat. Peringatan Hari Bumi dilakukan setiap tahun sebagai momen refleksi untuk meningkatkan kesadaran akan tantangan lingkungan dan kelestarian bumi yang semakin terancam. Di tengah perubahan iklim global, kerusakan lingkungan, dan kebutuhan akan sumber daya alam yang semakin meningkat, penting bagi kita untuk mengambil tindakan nyata dalam menjaga kelestarian bumi.

Berdasarkan *Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Report 2023*, perubahan iklim membawa dampak yang signifikan terhadap

kesehatan dan kelestarian satu-satunya planet yang ditinggali makhluk hidup ini, antara lain yaitu pemanasan bumi, naiknya permukaan air laut, bencana alam yang lebih sering dan parah, perubahan pola curah hujan, dan hilangnya keanekaragaman hayati.

Dalam menghadapi tantangan ini, Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah konkret, salah satunya adalah melalui komitmen dalam penanganan dampak perubahan iklim sejak 1994 lewat Undang-Undang Nomor 6/1994 tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention on Climate Change* yang menggambarkan keikutsertaannya dalam meratifikasi UNFCCC. Perubahan iklim menjadi salah satu prioritas nasional pemerintah dalam mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045 yaitu “Menuju Negara Nusantara yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”, di mana salah satu

targetnya adalah penurunan emisi gas rumah kaca hingga menuju *Net Zero Emission* di 2060 atau lebih cepat.

Guna mewujudkan hal tersebut, sektor yang terus dieksplor dan diupayakan pemerintah di antaranya adalah penggunaan energi baru terbarukan (EBT), termasuk dengan menggunakan panas bumi. Melansir Kementerian ESDM, Indonesia memiliki potensi EBT yang sangat melimpah yaitu sekitar 3.000 giga watt (GW), di mana potensi panas bumi mencapai 24 GW atau sekitar 40 persen potensi panas bumi dunia. Hal ini tak lepas dari kondisi bentang alam Indonesia yang terletak di *Ring of Fire*, yaitu zona geologi di sepanjang Samudra Pasifik yang memiliki aktivitas vulkanik tinggi, sehingga kawasan Indonesia dilimpahi banyak gunung berapi (per November 2023: 127 gunung berapi aktif dan 500 gunung berapi tidak aktif, Laporan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG)).

Kementerian ESDM juga menyatakan bahwa energi yang dihasilkan oleh panas bumi lebih bersih, dilihat dari emisi yang dihasilkan panas bumi hanya 1/15 dari emisi pembangkit listrik tenaga uap dengan bahan bakar batu bara, dan 1/10 dari bahan solar (Kementerian ESDM). Selain itu, luas area eksplorasi dan eksploitasi panas bumi sebagai sumber tenaga pembangkit energi listrik tergolong minim (hanya membutuhkan area 0,4 - 3 hektare), sementara pembangkit listrik tenaga uap lainnya membutuhkan area sekitar 7,7 hektare. Energi panas bumi dialirkan menggunakan pipa jangkauan pendek dan bersifat setempat (*locally*), sehingga tidak terpengaruh oleh biaya dan risiko transportasi. Selanjutnya, harga energi panas bumi akan kompetitif dalam jangka panjang, didukung dengan biaya pemeliharaan yang relatif rendah, tidak adanya *depletion cost*, dan tidak akan terpengaruh oleh dinamika harga energi global sehingga tarif listrik dapat ditetapkan "flat".

Selain itu, pemanfaatan panas bumi sebagai sumber energi juga berpotensi menggerakkan roda ekonomi daerah wilayah kerja panas bumi.

Meski disebutkan sebelumnya bahwa biaya pemeliharaan rendah, namun salah satu hal yang menjadi tantangan utama dalam pengembangan energi panas bumi adalah biaya investasi di awal yang cukup besar, antara lain disebabkan oleh biaya dan risiko yang tinggi, lokasinya yang berada di daerah jauh (*remote area*), dan waktu yang cukup lama dari tahap preliminary study hingga masa operasi. Untuk mengoptimalkan potensi EBT panas bumi di tengah berbagai tantangan tersebut, salah satu hal yang penting dilakukan adalah menurunkan risiko (*de-risking*), yang telah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 21/ 2014 tentang Panas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 7/2017 tentang Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung.

Dalam hal ini, pemerintah telah menyediakan dukungan APBN untuk membiayai pengembangan EBT panas bumi melalui dana Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi (PISP) yang dikelola PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) (Persero). Pemerintah bekerja sama dengan Bank Dunia juga menyediakan fasilitas pembiayaan dan mitigasi risiko atas kegiatan eksplorasi panas bumi melalui program Geothermal Resource Risk Mitigation (GREM) yang juga dikelola oleh PT SMI (Persero). Selain itu, pemerintah juga memberikan dukungan penjaminan melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) (Persero).

Saat ini pemerintah tengah melakukan pengembangan di dua wilayah kerja panas bumi, yaitu proyek Pembangunan PLTP Dieng 2 di Jawa Tengah dan PLTP Patuha 2 di Jawa Barat. Dalam hal ini, total investasi yang dibutuhkan atas pengembangan PLTP Dieng 2 dan Patuha 2 mencapai USD469,2 juta, yang akan dibiayai

melalui blended financing dari pinjaman dari Asian Development Bank serta porsi ekuitas PT GDE sebesar 25–30 persen, dan mendapat dukungan penjaminan pemerintah.

Keduanya merupakan proyek lanjutan untuk mengoptimalkan potensi energi panas bumi yang telah beroperasi sebelumnya yaitu PLTP Dieng 1 di Jawa Tengah dan PLTP Patuha 1 di Jawa Barat yang masing-masing memiliki kapasitas 55 MW net, serta PLTP *Small Scale* berkapasitas 10 MW di Dieng. Selain menjadi salah satu sumber energi, pengoperasian PLTP Dieng 1, PLTP *Small Scale*, dan PLTP Patuha 1 turut berkontribusi mendukung berbagai program pemerintah dalam menjaga kelestarian alam, keanekaragaman hayati, dan pengembangan wisata. Sebagai contoh, PLTP Dieng 1 dan *Small Scale* antara lain mendukung program: pengelolaan sampah Desa Jojogan, konservasi lahan di Desa Sikunang, pengembangan Ekowisata Gunung Bismo, percepatan Open Defecation Free, dan Gerakan Entaskan Kemiskinan Menuju Sejahtera. Sementara PLTP Patuha 1 juga turut mendukung konservasi keanekaragaman hayati primata Owa Jawa, pengembangan desa wisata, dan program pendampingan UMKM Saluyu.

Peringatan Hari Bumi tahun ini hendaknya menjadi panggilan bagi kita semua untuk bersatu dalam menjaga kelestarian bumi. Dengan komitmen bersama dan tindakan konkret, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Halaman Ini Dikosongkan

